

LAMPIRAN

I. DAFTAR ISTILAH

No	Istilah	Arti / Keterangan
A. ISTILAH STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN JABATAN ADAT		
1	Bendesa Adat	Pimpinan tertinggi Desa Adat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kehidupan adat, termasuk pengelolaan keuangan. Dalam konteks Desa Adat Alapsari disebut juga Kelian Desa Adat.
2	Kelian	Sebutan untuk ketua atau pemimpin dalam struktur desa adat (sinonim dengan Bendesa).
3	Penyarikan	Sekretaris atau pencatat administrasi dalam struktur Desa Adat. Bertugas mengelola dokumentasi, arsip, dan administrasi kelembagaan.
4	Patengen	Bendahara atau pengelola keuangan dalam struktur Desa Adat. Bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
5	Petajuh	Wakil ketua atau asisten Bendesa Adat yang membantu tugas-tugas kepemimpinan.
6	Prajuru	Pengurus atau perangkat Desa Adat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tata kelola desa adat secara keseluruhan.
7	Sabha Desa	Lembaga adat yang berfungsi sebagai forum pertimbangan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa adat. Setara dengan lembaga legislatif dalam struktur desa adat.
8	Kertha Desa	Lembaga adat yang berfungsi menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara adat (wicara) berdasarkan hukum adat. Setara dengan lembaga yudikatif dalam struktur desa adat.
9	Prahulu	Tokoh atau tetua adat (pendahulu) yang memiliki peran sentral dan historis dalam menjaga serta menjalankan tradisi dan hukum adat.
10	Kelian Banjar	Ketua tingkat banjar (sub-wilayah desa adat).
11	Kelian Tempek	Ketua tingkat tempek (wilayah lebih kecil dalam banjar).
12	Kelian Dadia	Ketua kelompok keluarga besar (dadia) dalam struktur masyarakat adat Bali.
13	Jro Mangku	Pemangku atau pemuka agama Hindu yang bertugas memimpin upacara keagamaan di pura.
14	Pecalang	Petugas keamanan adat yang bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan dalam kegiatan adat dan keagamaan.
15	Yowana	Organisasi pemuda dalam struktur Desa Adat.

16	Serati Banten	Kelompok atau individu yang bertugas meracik dan menyiapkan sarana upacara (banten) untuk kegiatan keagamaan.
17	Pasikian Pakis	Kelompok atau Organisasi perempuan dalam struktur Desa Adat.
18	Paiketan Pemangku	Organisasi atau himpunan pemangku (pemuka agama) di lingkungan Desa Adat.
19	Paiketan Sekaa Shanti	Kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang kegiatan sosial dan keagamaan.
20	Paiketan Sarati Banten	Organisasi atau kelompok yang bertugas menyiapkan sarana upacara (banten).
21	Seka Truna	Kelompok pemuda (sekaa = kelompok, truna = pemuda).
B. ISTILAH FORUM DAN MEKANISME MUSYAWARAH ADAT		
22	Paruman	Forum musyawarah adat di Bali yang menjadi mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Dapat diartikan sebagai "rapat adat" atau "musyawarah adat".
23	Paruman Alit	Forum musyawarah adat tingkat kecil/internal yang melibatkan Prajuru, Sabha Desa, dan Kertha Desa. Berfungsi sebagai verifikasi awal. Disebut juga Pra Paruman atau Paruman Prajuru.
24	Paruman Madia	Forum musyawarah adat tingkat menengah yang melibatkan lembaga-lembaga desa dan Kelian dadia. Berfungsi untuk penyerapan aspirasi.
25	Paruman Agung	Forum musyawarah adat tingkat tertinggi yang melibatkan seluruh Krama Desa. Berfungsi sebagai legitimasi kolektif dan pengesahan keputusan final.
26	Sangkep	Istilah lain untuk forum musyawarah adat (sinonim dengan Paruman).
27	Paruman Pra	Pra-musyawarah atau pertemuan awal sebelum Paruman resmi dilaksanakan (sinonim dengan Paruman Alit).
C. ISTILAH KONSEP FILOSOFIS DAN KEARIFAN LOKAL		
28	Sad Kerthi	Konsep kearifan lokal Bali yang terdiri dari enam prinsip kesucian: Atma kerthi, Jana kerthi, Segara kerthi, Danu kerthi, Wana kerthi, dan Jagat kerthi. Merupakan filosofi dasar kehidupan masyarakat Bali.
29	Atma kerthi	Salah satu dimensi Sad Kerthi yang berarti penyucian jiwa atau dimensi spiritual. Dalam pengelolaan keuangan, diwujudkan melalui alokasi anggaran untuk kegiatan keagamaan, upacara adat, dan pelestarian pura.
30	Jana kerthi	Salah satu dimensi Sad Kerthi yang berarti penyucian manusia atau dimensi sosial-kemanusiaan. Dalam pengelolaan keuangan, diwujudkan melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan sosial.

31	Segara kerthi	Salah satu dimensi Sad Kerthi yang berarti penyucian laut dan pantai. Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.
32	Danu kerthi	Salah satu dimensi Sad Kerthi yang berarti penyucian sumber air. Diwujudkan melalui program pemeliharaan mata air, sungai, dan ekosistem air.
33	Wana kerthi	Salah satu dimensi Sad Kerthi yang berarti penyucian tumbuh-tumbuhan. Berkaitan dengan pelestarian hutan, penghijauan, dan pelestarian flora.
34	Jagat kerthi	Salah satu dimensi Sad Kerthi yang berarti penyucian alam semesta. Merupakan dimensi yang menyeluruh, menekankan keharmonisan tatanan kehidupan secara keseluruhan.
35	Tri Hita Karana	Falsafah hidup masyarakat Bali yang menekankan tiga hubungan harmonis: dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan lingkungan (Palemahan).
36	Parahyangan	Dimensi hubungan manusia dengan Tuhan dalam konsep Tri Hita Karana. Berkaitan dengan kegiatan spiritual dan keagamaan.
37	Pawongan	Dimensi hubungan antarmanusia dalam konsep Tri Hita Karana. Berkaitan dengan kehidupan sosial, gotong royong, dan kesejahteraan masyarakat.
38	Palemahan	Dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam dalam konsep Tri Hita Karana. Berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan.
39	Sekala	Dimensi fisik atau terlihat dalam falsafah Bali. Berkaitan dengan dunia nyata, hubungan antarmanusia, dan hal-hal yang dapat diindra.
40	<i>Niskala</i>	Dimensi spiritual atau tidak terlihat dalam falsafah Bali. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, alam gaib, dan hal-hal yang bersifat transendental.
41	Nangun Sat Kerthi Loka Bali	Visi pembangunan Provinsi Bali yang berarti "memelihara kesucian dan keharmonisan Bali" secara menyeluruh, sekala dan <i>niskala</i> .
42	Menyama Braya	Konsep kebersamaan, persaudaraan, dan solidaritas sosial dalam budaya Bali. Menekankan rasa kekeluargaan dan gotong royong.
43	Ngayah	Konsep gotong royong atau kerja bakti dalam budaya Bali, dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bersama tanpa pamrih.
44	Dharma	Kebenaran, kewajiban moral, dan ajaran kebajikan dalam agama Hindu yang menjadi pedoman hidup.
D. ISTILAH HUKUM DAN REGULASI ADAT		
45	Awig-Awig	Hukum adat tertulis yang mengatur tata hubungan kemasyarakatan, hak, kewajiban, serta tanggung

		jawab sosial seluruh Krama Desa Adat. Merupakan konstitusi tertulis desa adat.
46	Pararem	Peraturan pelaksanaan dari Awig-Awig yang bersifat lebih teknis dan operasional. Dibuat untuk mengatur hal-hal spesifik dalam kehidupan sehari-hari di desa adat.
47	Karma Pala	Konsep hukum karma dalam ajaran Hindu Bali, yaitu keyakinan bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil (buah perbuatan) yang setimpal.
48	Wicara	Perkara atau sengketa adat yang ditangani oleh Kertha Desa.
49	Dresta	Tradisi atau kebiasaan yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat.
50	Kahyangan	Tempat suci / pura dalam agama Hindu Bali.
E. ISTILAH KEGIATAN DAN UPACARA ADAT		
51	Piodalan	Upacara keagamaan di pura yang dilaksanakan secara rutin (biasanya setiap 6 bulan sekali/210 hari) untuk memperingati hari suci / ulang tahun pura.
52	<i>Purnama Tilem</i>	Rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan pada saat bulan <i>Purnama</i> (<i>Purnama</i>) dan bulan mati (<i>Tilem</i>) setiap bulannya.
53	Nyepi	Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka yang dirayakan dengan tapa brata (berpuasa, tidak menyalakan api, tidak bekerja, tidak bepergian, dan tidak bersenang-senang).
54	Tumpek Uye	Hari raya yang berkaitan dengan pemujaan terhadap tumbuh-tumbuhan, dilaksanakan setiap 210 hari sekali. Biasanya diisi dengan upacara dan penanaman pohon.
55	Tumpek Uduh	Hari raya yang berkaitan dengan pemujaan terhadap hewan, dilaksanakan setiap 210 hari sekali.
56	Mabea	Upacara adat yang dilaksanakan di Desa Adat Alapsari, diringi dengan Tari Baris Gede, gambang, ngoncang, dan gong gede.
57	Peturunan	Iuran atau sumbangan sukarela dari Krama Desa untuk membiayai kegiatan keagamaan dan adat.
58	Pasraman	Program pendidikan keagamaan dan budaya bagi anak-anak di lingkungan desa adat. Bertujuan untuk penguatan SDM dan pelestarian nilai-nilai adat.
59	Pebecikan	Kegiatan pembersihan dan perbaikan wewidangan (wilayah) pura atau tempat suci.
60	Pabersihan	Kegiatan pembersihan wilayah atau tempat suci secara kolektif.
61	Palinggih	Tempat bersemayamnya roh suci / dewa di pura.
F. ISTILAH WILAYAH DAN TEMPAT SUCI		

62	Kahyangan Tiga	Tiga pura utama dalam setiap Desa Adat di Bali: Pura Desa (Pura Bale Agung), Pura Puseh, dan Pura Dalem.
63	Kahyangan Desa	Pura-pura suci yang menjadi tempat pemujaan bersama dalam lingkup Desa Adat.
64	Pura Dalem	Pura yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa atau manifestasinya, sering dikaitkan dengan aspek kematian dan roh leluhur.
65	Pura Bukit	Pura Desa yang ada di Desa Adat Alapsari
66	Pura Taman Beji	Pura yang terletak di dekat sumber mata air (beji), berfungsi sebagai tempat pemujaan dan pembersihan diri secara spiritual.
67	Yeh Anakan	Nama sumber mata air yang terletak di wilayah Desa Adat Alapsari (Yeh = air, Anakan = anak).
68	Yeh Taman Beji	Area sumber mata air dan pemandian suci di Desa Adat Alapsari.
69	Setra	Tempat pemakaman atau kuburan dalam masyarakat adat Bali.
70	Banjar Adat	Sub-wilayah atau unit komunitas terkecil dalam struktur Desa Adat.
71	Tempek	Wilayah yang lebih kecil dari banjar, merupakan bagian dari banjar adat.
72	Pelaba Pura	Tanah atau aset milik pura yang dikelola oleh Desa Adat.
73	Tanah Karang Ayahan Desa	Tanah yang merupakan milik desa adat dan digunakan untuk kepentingan bersama.
74	Tanah Karang Mapipil	Tanah yang merupakan milik pribadi (keluarga) tetapi berada dalam wilayah desa adat.
G. ISTILAH KATA DAN FRASA BAHASA BALI DALAM WAWANCARA		
75	Tiang / Titiang/ tyang	Saya (bahasa Bali halus). Digunakan sebagai bentuk kesantunan dalam berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati.
76	Mangkin	Sekarang, saat ini.
77	Napi / Napi-napi	Apa / apa-apa.
78	Wenten	Ada, terdapat.
79	Sekadi / Sekadi Punika	Seperti / seperti itu.
80	Punika / Puniki	Itu / ini.
81	Ring	Di, pada (kata depan penunjuk tempat).
82	Sareng	Dengan, bersama.
83	Sane	Yang (kata penghubung).
84	Nunas	Mohon, meminta (dengan hormat).
85	Astungkara	Atas karunia Tuhan, berkat (ungkapan rasa syukur).
86	Inggihan	Yang berkaitan, yaitu.
87	Pinaka	Sebagai, selaku.
88	Rikala	Pada saat, ketika.

89	Kenten	Demikian, begitu.
90	Nike / Niki	Ini (untuk menunjukkan sesuatu yang dekat).
91	Utawi	Atau.
92	Taler	Juga.
93	Manten	Tetap, saja (dalam konteks "hanya itu saja").
94	Sampun	Sudah, telah.
95	Dumun	Dulu, terlebih dahulu.
96	Ring jagad Sad Kerthi	Di dalam alam Sad Kerthi (konteks filosofis).
97	Ngaturang ayah	Melakukan pengabdian
98	Nyangkepang	Melengkapi, menyempurnakan.
99	Menyobeang	Menyiarkan, menginformasikan kepada publik.
100	Ngelaksanayang	Melaksanakan.
101	Kajudi dados	Terpilih menjadi, ditunjuk sebagai.
102	Banten	Sarana upacara/persembahan dalam agama Hindu Bali.
103	Kulkul	Alat komunikasi tradisional Bali berupa kentongan besar yang dipukul untuk memberi tanda atau panggilan.
104	Suksma	Ucapan terima kasih (bahasa Bali halus).
105	Kuleman	Bentuk panggilan/undangan untuk Krama dalam kegiatan adat.
106	Krama	Anggota atau warga masyarakat Desa Adat (masyarakat adat).
107	Krama Desa	Seluruh warga masyarakat adat yang menjadi anggota Desa Adat.

II. TRANSKRIP WAWANCARA

Penelitian Kualitatif

Judul Penelitian:

**Pengelolaan Keuangan Desa Adat Berbasis *Sad Kerthi* di Desa Adat Alapsari:
Sudut Pandang Teori Institusional**

Pendekatan	Penelitian Kualitatif
Metode	Wawancara Mendalam
Lokasi	Desa Adat Alapsari, Buleleng, Bali
Periode Pengumpulan Data	1 – 11 Februari 2026
Jumlah Narasumber	6 (enam) orang



Petunjuk Pembacaan Wawancara

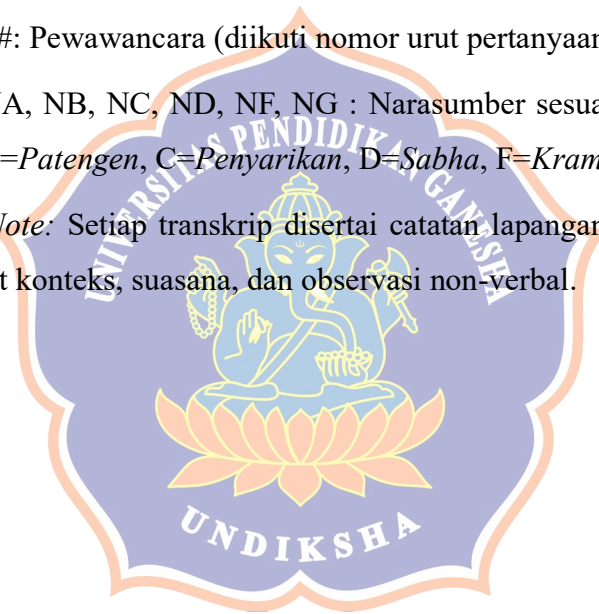
Transkrip wawancara ini disusun sesuai kaidah penelitian kualitatif. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam membaca dokumen ini:

1. *Verbatim*: Setiap jawaban narasumber ditranskripsikan secara verbatim (kata per kata) sesuai rekaman audio, termasuk pengulangan kata, kata seru, jeda, dan campuran bahasa Indonesia-Bali.
2. *Code Switching*: Narasumber secara alami menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Ini dipertahankan sebagai data linguistik yang penting.
3. Kode Wawancara:

P#: Pewawancara (diikuti nomor urut pertanyaan)

NA, NB, NC, ND, NF, NG : Narasumber sesuai kode (A=Bendesa, B=Patengen, C=Penyarikan, D=Sabha, F=Krama, G=Kertha)

4. *Field Note*: Setiap transkrip disertai catatan lapangan pewawancara yang memuat konteks, suasana, dan observasi non-verbal.



DAFTAR NARASUMBER PENELITIAN

Kode	Nama	Jabatan	Tanggal	Waktu	Lokasi
A	I Gede Dedi Herawan	<i>Bendesa Adat</i> (Kepala Desa Adat)	1 Februari 2026	16.20 - 17.36 WITA	Rumah <i>Bendesa Adat</i>
B	Ketut Sulaba	<i>Patengen</i> (Bendahara Desa Adat)	1 Februari 2026	17.35 - 18.05 WITA	Rumah <i>Patengen</i>
C	Kadek Nova Budiasa	<i>Penyarikan</i> (Sekretaris Desa Adat)	3 Februari 2026	18.00 - 18.20 WITA	Rumah <i>Penyarikan</i>
D	Ketut Mertana	Anggota <i>Sabha</i> <i>Desa Adat</i>	11 Februari 2026	14.54 - 15.15 WITA	Rumah <i>Sabha Desa</i>
E	Ketut Widiassa	<i>Krama</i> (Anggota Masyarakat Adat)	11 Februari 2026	14.15 - 14.40 WITA	Pura Bukit Desa Adat Alapsari
F	Ketut Seken	Anggota <i>Kertha Desa</i> / Pecalang	2 Februari 2026	19.05 - 19.30 WITA	Rumah <i>Kertha Desa</i>



TRANSKRIP WAWANCARA A (BENDESA DESA ADAT ALAPSARI)

Kode Narasumber	A
Nama Narasumber	I Gede Dedi Herawan
Jabatan / Peran	<i>Bendesa Adat</i> (Kepala Desa Adat)
Tanggal Wawancara	1 Februari 2026
Waktu Wawancara	16.20 – 17.36 WITA
Durasi	76 menit
Lokasi Wawancara	Rumah <i>Bendesa Adat</i> , Desa Adat Alapsari
Pewawancara	Peneliti
Bahasa	Indonesia / Bali (Campur kode / <i>Code-switching</i>)

A. Catatan Lapangan Pewawancara (*Field Note*)

Catatan Kontekstual:

Wawancara dilakukan di rumah *Bendesa Adat* pada sore hari. Suasana kondusif dan narasumber sangat kooperatif dalam memberikan informasi. Narasumber menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Bali (*code-switching*) secara alami, khususnya saat menjelaskan konsep-konsep adat yang tidak memiliki padanan kata tepat dalam bahasa Indonesia. Narasumber tampak antusias dan sangat memahami seluk-beluk pengelolaan keuangan desa adat. Beberapa kali narasumber menggunakan kata "*tiang/titiyang*" (saya dalam bahasa Bali halus) sebagai bentuk kesantunan bahasa Bali.

A. Hasil Wawancara (*Verbatim*)

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P1 : Bagaimana Bapak memahami konsep *Sad Kerthi* dalam konteks pengelolaan keuangan desa adat?

NA : Secara garis besar, konsep pengelolaan *Sad Kerthi* loka Bali adalah visi pembangunan Bali yang berakar kuat, dari kearifan lokal, agama Hindu, dan budaya Bali. Dengan tujuan menjaga kesucian dan keharmonisan Bali secara menyeluruh, *sekala* dan *niskala*.

P2 : Dari keenam dimensi *Sad Kerthi* (*Atma*, *Jana*, *Segara*, *Danu*, *Wana*, dan *Jagat kerthi*), dimensi mana yang paling dominan dalam pengambilan keputusan keuangan? Mengapa?

NA : Ring jagad *Sad Kerthi* mengacu pada kehidupan sosial terhadap masyarakat, karena untuk ekonomi, untuk anggaran, kita mengacu pada anggaran untuk keuangan, tetap mengacu kepada dipawongan di jagad *Sad Kerthi*. Nanging (Namun), tidak menutup kemungkinan juga untuk anggaran Punika (ini) pasti masuk lagi ke danu *Sad Kerthi*, *Segara kerthi*. Jadinya terkait dengan acara-acara seperti ring di *Danu kerthi*, anggap pemeliharaan mata air dan sungai, *Segara kerthi* juga seperti itu, perlindungan aset-aset desa adat punika (itu), jadi yang paling dominan Punika menurut tiang (saya) pasti di jagad Kerthi, karena mengacu kepada dipawongan, di skala pawongan, karena lebih banyak disana mengatur keuangan Punika. Namun, tidak lepas kemungkinan juga di *Atma kerthi* juga nyambung jadinya, nyambung diparahyangan pawongan dan pelemahan sekadi (seperti) punika (itu).

P3 : Bagaimana proses penyusunan APB Desa Adat di Desa Alapsari?

NA : Kita sekarang di desa adat Alapsari menerapkan dua sistem. Sistem pertama, sistem APBD berbasis desa adat, dan kedua karena ada BKK Punika, artinya bantuan APBD semesta berencana, kita juga tidak memungkiri lagi, kita jadinya menyusun dua APBD, jadi dengan anggaran APBD semesta berencana Punika karena jumlahnya sedikit, kita dibantu oleh pagu di desa adat. Kita pertama dalam tahap perencanaan anggaran Punika, titiyang (saya) nunas (meminta) ke penglisir titiyang ring *Sabha Desa* untuk mengkondisikan terkait anggaran-anggaran yang akan dilaksanakan. Kedua,

tyang menyerap aspirasi lembaga-lembaga desa, seperti lembaga pecalang, serati Banten, Pasikian Pakis, Jero manku, dan *Yowana*.

Lembaga-lembaga Punika titiang fungsikan dengan tujuan titiang (saya) di desa Alapsari jadi terkaper semua, jadi keinginan, kebutuhan daripada lembaga-lembaga Punika terpenuhi semua. Dan skalagus juga titiang (saya) pinaka (sebagai) bendesa, tidak serta-merta harus tiang (saya) yang menentukan semua, karena dengan adanya titiang (saya) konsultasi atau penjaringan inggihan pendapat-pendapat dari lembaga-lembaga Punika, tiang (saya) juga tahu apa-apa kebutuhan daripada lembaga itu, dan apa-apa yang harus dilakukan oleh lembaga itu. Jadi dengan acara Punika, tiang (saya) seperti di desa dinas, musrembangdes, karena tiang (saya) juga sedikit tahu tentang anggaran di desa dinas, jadi tiang (saya) terapkan juga itu di masyarakat adat seperti itu.

P4 : Nilai-nilai *Sad Kerthi* mana saja yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan prioritas alokasi anggaran?

NA : Di Jagad Kerti dan Jana Kerti. Jagad Kerti ini kan keharmonisan kehidupan sosial dan tatanan Masyarakat artinya menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan berbudaya. Dan di Jana Kerti niki (ini) ke peningkatan kualitas manusia Bali. Tiang (saya) niki (ini) terus terang untuk mangkin (hari ini) niki (ini) tiang (saya) penguatan SDM. Penguatan SDM, ya kalau SDM kita sudah kuat, otomatis akan menguatkan juga di paharyangan dan pawongan, dan pahlemahan skalapun itu. Artinya di Jagad Kerti juga terkait dengan kesesadan jasmani rohani dari *Krama* adat, berpengetahuan, dan berdaya saing untuk ke depannya.

P5 : Bisakah Bapak berikan contoh konkret bagaimana dimensi Parahyangan (*Atma kerthi*) diterapkan dalam alokasi anggaran?

NA : Untuk Atma Kerti, terus terang, untuk BKK, BKK di Atma Kerti, Titiang (saya), wenten (ada) kegiatan rutin, kegiatan desa adat. Nah, jadi untuk dana BKK Punika, dari Atma Kerti, untuk membantu pertama di kegiatan *Purnama Tilem*. *Purnama Tilem*, karena itu ada persembahan bersama di Desa Adat Alapsari, Nyepi, yang sehari-hari dilaksanakan, dan Piodalan. Piodalan

tiyang bisa dibantu kesana dengan tujuan, kenapa Tiang (saya) ambil juga dari BKK kegiatan Punika, karena bersifat rutin, jadi meringankan beban *Krama*. Karena dari dulu juga, Piodalan di Desa Adat Alapsari, atau acara-acara bersekala desa, kita memungkut peturunan. Jadi astungkara dengan adanya dana BKK Puniki, semesta berencana, ada dan ada faedah dari masyarakat kami. Jadi seperti Nyepi, titiyang di Desa Adat Alapsari, tidak pernah mengadakan peturunan. Karena dibantu full dari dana BKK Punika. Punika Tiang (saya) untuk diparahyangan, sekadi untuk perbaikan, atau pelestarian seperti simbol-simbol keagamaan, itu nanti Tiang (saya) ambil di BKK. Mungkin tidak full, tapi pasti akan dibantu oleh dana Desa Adat sekadi Punika.

P6 : Bagaimana dimensi Pawongan (*Jana kerthi*) diwujudkan dalam program-program kesejahteraan masyarakat?

NA : Untuk di Jana Kerti, tiang (saya) sebenarnya sudah jalan dua tahun dalam program Pasraman, Pasraman Desa Adat. Kalau dulu-dulu Tiang (saya) waktu sudah jadi admin di *Prajuru* Desa Adat, Pasraman punika hanya seperti menjalankan program. Yen Tiang (saya) Mangkin (hari ini) Pasraman punika dengan penguatan kapasitas anak-anak didik yang continue, artinya secara terus menerus, tidak ada henti. Anggaran Pasraman, anggap anggaran sekarang ini 10 juta, ini dipakai satu tahun full. 1 Tahun full kegiatan Pasraman untuk anak-anak kelas 4 SD dengan mengikuti bahasa Bali, agama, budi pekerti, menjejaitan yang continue setiap hari Kamis dilakukan di Desa Adat Alapsari untuk Pasraman Punika dengan tujuan yang pertama adalah screening, screening bagi anak-anak didik yang belum bisa membaca, belum bisa bahasa Latin dan bahasa Bali. Dan tujuannya adalah untuk menguatkan SDM, masyarakat saya di Desa Adat. Terkait Jagad Kerti, Kehidupan Sosial dan Tatanan Masyarakat yang menciptakan rasa damai, rasa aman di masyarakat dengan menggunakan lembaga Titiang (saya) Ring Pecalang, Pecalang Desa Adat, *Kertha Desa* dan *Sabha Desa* tiyang ikutkan dalam program penguatan kapasitas. Jadi secara tidak langsung dia tahu apa Tupoksi sebagai Pecalang, apa Tupoksi sebagai *Kertha Desa* dan *Sabha Desa*. Karena, selama ini hanya nyantol saja, artinya jadi apa jadi *Kertha Desa* gitu, tapi

untuk Tupoksinya dia tidak tahu. Tiang (saya) tetap melakukan penguatan kapasitas dari awal di *Prajuru*, di Serati banten, Jro mangku, tetap tiyang kuatkan kapasitas arahnya untuk satu pemahaman ke depannya. Satu pemahaman, satu visi dan misi untuk membangun Desa Adat Alapsari.

P7 : Bagaimana dimensi Palemahan (Segara, Danu, Wana, *Jagat kerthi*) tercermin dalam program pelestarian lingkungan?

NA : Ya, ada. Kebetulan untuk Tiang (saya) di Desa Adat Alapsari, karena kita terus terang untuk lokasi. Untuk lokasi, dibidang pegunungan tidak juga. Dibidang dekat dengan pantai juga tidak. Tiang (saya) berpikir ke sana. Jadi untuk program Danu Kerti dan Wana Kerti, kadang Wana Kerti tiyang mungkin dengan melaksanakan seperti tumpek uye, tumpek uye dengan penanaman pohon sekadi Punika, tiyang anggarkan di sana. Kebetulan untuk mangkin (saat ini) BKK Punika, karena di sana tidak ada mengkhusus untuk anggaran untuk pelaksanaan tumpek. Tiang (saya) tumpek Punika tiyang ambil di Dana Desa Adat, tapi tiyang rutin laksanakan seperti tumpek uye atau tumpek uduh kenten, sebagai cerminan dari Wana Kerti. Dan Danu Kerti yang ambil perawatan mata air dan sungai.

Kebetulan Tiang (saya) di sini ada mata air, di Yeh anakan namanya, Yeh Anakan, Pura Beji Yeh Anakan. Nah Tiang (saya) Punika tetap rutin, dari *Prajuru* Tiang (saya), khususnya di bagian pemeliharaan seperti tukang sapu, pebersih-bersih hingga wawidangan Punika. Jadi biar rutin, Tiang (saya) anggarkan dari BKK Punika. Dan perawatan mata air Punika, Tiang (saya) bertanggung jawab penuh dengan perawatan Punika, biar air tidak keruh, biar masyarakat yang akan ke sana juga bisa nyaman di sana. Jadi Tiang (saya) itu ambil dari anggaran Punika.

P8 : Bagaimana Bapak mengintegrasikan ketentuan Pergub Bali No. 2 Tahun 2023 dengan nilai-nilai adat dalam pengelolaan keuangan?

NA : Untuk Pergub Bali nomor 2 tahun 2023 kebetulan kan ini amandemen dari Pergub sebelumnya. Jadi Tiang (saya) merasa tidak mengalami kesusahan karena terus terang untuk di Desa Adat Alapsari tergalong Desa Adat Anyar. Jadi kita sepakat, *Krama Desa* sepakat mematuhi segala Pergub sekadi

pokokne aturan di atasnya di luar *Awig-Awig*, tiyang sepakat menjalani Punika. Dan kebetulan *Krama* semua setuju terkait Napi-Napi sane dianggarkan atau dilaksanakan oleh Gubernur Bali saat ini. Karena untuk kegiatan-kegiatan diselaraskan, jadi semua berjalan dengan biasa atau berjalan dengan lancar.

P9 : Apakah ada tantangan dalam menyelaraskan regulasi formal dengan praktik tradisional? Bisa dijelaskan?

NA : Banyak tantangan, Banyak tantangan, karena berbicara regulasi formal karena dulu juga sistem kelengkapan dengan Desa Adat jadi ibaratnya hanya pertanggung jawaban di *niskala* saja dan sekarang dengan adanya regulasi formal ini harus ada kelengkapan data seperti foto atau data-data pendukung Punika inggihan untuk *nyangkepang* dan biar sama antara kegiatan-kegiatan Punika. Jadi ada tantangannya di sana, jadi kita harus mengajar juga *Prajuru-Prajuru* kita biar tahu cara menyajikan SPJ yang baik dan maaf untuk SPJ tiyang berusaha juga menyaduk dari data yang *fix* atau data yang sudah dikasih oleh provinsi inggihan penyajian Punika karena hanya orang-orang keuangan saja yang tahu jadi tiyang berusaha menyederhanakan, jadi *Krama* titiyang juga mengerti terkait penggunaan keuangannya seperti apa, karena ring desa adat sistemnya tradisional karena kalau formal Punika untuk anggaran punika sesuai nomenklatur, jadi nomenklatur Punika tiyang sederhanakan biar masyarakat tiyang mengetahui apakah nomenklatur ini apasih artinya seperti itu. jadi tantangannya seperti itu, jadi yang kedua juga tantangannya keterbukaan, keterbukaan *Prajuru-Prajuru* mungkin sekarang karena ada perpindahan *Prajuru* lama dan *Prajuru* baru jadi banyak tantangan di sana. Jadi tiyang mengarahkan agar *Prajuru* lama segera memperbaiki diri atau biar bisa beradaptasi dengan *Prajuru* baru terkait dengan laporan keuangan inggihan ketransparansi keuangan yang ada di desa adat seperti itu dan titiyang di desa adat Alapsari titiyang mencontoh yang baik di desa dinas inggihan Punika titiyang setiap laporan pasti akan mengunggah kegiatan-kegiatan Punika di media sosial jadi biar sama-sama bisa memantau.

P10 : Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan kepada *Krama Desa* adat?

NA : untuk mekanisme pertanggung jawaban yang sudah tiyang jalani pertama tiyang melaksanakan dumun *Paruman* pra artinya pra itu pramusyawarah mupakat, pra *Paruman* terkait LPJ punika tiyang hadirkan pertama *Sabha Desa*, *kelihan banjar* adat, *kelihan tempek* dan *jro mangku kayangan* tiga dan *Penyarikan* artinya yang bertugas di wewidangan parahyangan. Tiang (saya) disana juga menggodok dulu jadi sebelum tiang (saya) sampaikan ke *Paruman* agung tiang (saya) sampaikan dulu disana sama pertanggung jawaban dulu sama penglingsir-penglingsir jadi mungkin ada hal-hal yang dirubah atau kata-kata biasanya tiang (saya) tidak pernah merubah angka disana cuma merubah kata-kata artinya nomenklatur tiyang rubah karena maaf karena di desa adat masih berpikir tradisional seperti itu. Kalau kita memakai nomenklatur yang menjelemet warga tidak akan tahu jadi tiang (saya) tetap menyiapkan nomenklatur yang bagus biar orang-orang non-akuntansi orang-orang non keuangan mengerti tentang laporan keuangan kita. Selanjutnya setelah fix di pra *Paruman* agung, tiyang langsung ke *Paruman* madia. *Paruman* Madia itu yang hadir itu *jro mangku kayangan* 3, *Penyarikan*, *Kelian banjar*, *Kelian tempek*, *Sabha Desa*, *Kertha Desa* dan *Kelian-Kelian* dadia di Desa adat Alapsari. Tujuannya untuk hasil *Paruman* Punika biar disampaikan ke warga-warga dadia dan ketiga setelah *Paruman* madia fix tiang (saya) langsung ke *Paruman* agung. *Paruman* agung yang dihadiri oleh seluruh warga Desa Adat Alapsari yang menyampaikan *Krama-Kramanya* disana, jadi tiyang (saya) juga punya bukti kuat karena dari step-step atau tahap-tahapan Punika sudah mencapai kemupakatan. Jadi untuk *Paruman* agung tiyang (saya) sebatas menyobeang utawi menyiarkan ke *Kramaan* adat. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan karena tiang (saya) sudah berbekal banyak saksi dari *Paruman* pra *Paruman*, *Paruman* madia jadi tiyang (saya) juga banyak punya narasumber rikala (Ketika) membahas indik punika. Jadi tidak terpaku ke *Kelian* desa adat manten.

P11 : Apakah ada perbedaan mekanisme pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat adat?

NA : ya kalau mekanisme dari pemerintah daerah pasti mengarah ke kegiatan misal kegiatan A harus lengkap dengan rekanan-rekanan itu, jadi kita harus mendaftarkan rekanan terlebih dahulu, jadi untuk harga-harga kabupaten bagaimana, terkait foto-foto kegiatan, absen serah terima barang, pokoknya banyak dokumen-dokumen yang disiapkan tapi kalau untuk desa adat karena kita masih sistem tradisional jadi orang-orang desa adat pun sebenarnya gampang karena dia berpatokan ke hukum *niskala* jadi *Krama* adat itu pasti berpikiran ke hukum *niskala*, kalau dia berani ya mudah-mudahan dia mendapat karmanya pasti seperti itu dia pikirkan dan dia kadang-kadang juga enggan melihat nilai uang, melihat nilai gini karena orang-orang adat seperti itu memang dia pertama tidak mau masuk terlalu dalam dan tidak mau juga dimusuhi oleh yang lainnya sekadi punika, tapi menurut tiyang sekarang mulai evaluasi dan mulai juga sering mengarahkan masyarakat adat biar mengetahui sedikit tidak laporan keuangan desa adat seperti apa. Jadi tiyang menyajikan berusaha sesimple mungkin dan biar masyarakat adat kita lebih mengerti penggunaan keuangan desa adat.

P12 : Selain ke *Krama Desa*, apakah ada laporan yang ditujukan ke pemerintah?

NA : ya, pasti karena kita menyangkut ke BKK laporan semesta berencana Punika disetor setiap tahun Punika maksimal tanggal 10 Januari tahun-tahun bersangkutan, jadi selain kita nyetor di BKK juga tiang (saya) tetap bersama *Sabha Desa* mengecek kegiatan, mengecek anggaran-anggaran bila mana ada yang belum terlaksana kegiatan-kegiatan Punika jadi tiang (saya) berusaha pus biar terlaksana dan tetap dibantu oleh Pengurus-Pengurus tiang (saya) ritatkala menjalankan anggaran semesta berencana Punika

P13 : Bagaimana struktur organisasi pengelolaan keuangan di Desa Adat Alapsari?

NA : untuk pengelolaan keuangan di desa adat Alapsari, kebetulan mangkin sudah ada dana BKK titiang (saya) untuk strukturnya sekali memang tidak ada tapi titiang (saya) tetap menyampaikan ke penglingsir ke *Krama Desa* bahwa di desa adat Alapsari ada dua bendahara. Pertama, Bendahara pertama mengatur pengeluaran di desa adat Alapsari dari kas Desa Adat Alapsari. Yang kedua,

dari bendahara kedua yaitu mengatur kegiatan pengeluaran keuangan di BKK utawi dari semesta berencana itu strukturnya.

P14 : Apa peran *Sabha Desa* dalam pengawasan pengelolaan keuangan?

NA : *Sabha Desa* mempunyai peran sangat penting didalam pengawasan keuangan dari sistem perencanaan, pertama perencanaan keuangan eksekusinya juga dia juga turut serta terlibat di sana, *Paruman-Paruman* inggihan (berkaitan) merencanakan hal-hal tersebut tiang (saya) minta bantuan *Sabha Desa*, jadinya sekarang untuk desa adat tiang (saya) bersyukur juga karena ada *Sabha Desa* jadi cumpuan-cumpuan indik pembangunan perencanaan tidak serta-merta ke *Kelian* desa adat kita tetap minta sumbangsih dari *Sabha Desa* untuk merencanakan taler (juga) untuk sebagai bahan tiang (saya) pertimbangan saat tiang melakukan pembangunan-pembangunan utawi perencanaan baik bersifat diparahyangan, pawongan, dan pelemahan.

P15 : Apakah ada pedoman atau panduan khusus yang mengatur pengelolaan keuangan berbasis *Sad Kerthi*?

NA : untuk di pemerintahan titiang (saya) belum sih dapat juklak dan juknisnya tapi untuk buku saku terkait pengelolaan keuangan tiang (saya) sudah dapat, ya di sana juga sudah tercantum jadi hal-hal mana saja yang boleh dilakukan dan hal-hal mana saja yang tidak bisa ambil oleh BKK Semesta Berencana Puniki

P16 : Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi nilai-nilai lokal dalam pengelolaan keuangan?

NA : dukungan pemerintah dengan mengadakan seminar-seminar dan tapi dalam tahap zoom meeting atau online. Online dilakukan kegiatan penguatan kapasitas skala online tapi kalau masukkan titiang (saya) untuk kedepannya biar dilakukan secara offline jadi peserta akan lebih fokus terhadap kegiatan itu. karena sekarang setiap online pasti yang saya lisad banyak orang-orang yang tidak fokus dengan seperti mematikan kamera jadi terkesan bekerja lain seperti itu jadi kegiatan punika jadi tidak focus, jadi penyampaian-penyampiannya pun tidak bisa terserap 100% oleh audiens yang mengikuti kegiatan tersebut.

P17 : Apakah ada program pelatihan atau pendampingan yang pernah diterima?

NA : biasanya dilakukan sebelum SPJ Desa Adat, SPJ Desa adat pasti sebelumnya pemerintah-pemerintah provinsi punika menyelenggarakan persepsi dengan cara penguatan kapasitas lalu zoom meeting kegiatan itu dan untuk di offline memang tidak pernah jadi di tiang (saya) kadang-kadang itu yang berat menurut saya.

P18 : Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam pengelolaan keuangan modern?

NA : Tantangan terbesar karena saya juga merasa untuk BKK utawi dana hibah semesta berencana punika tidak serta-merta full menghandle kegiatan Desa adat, tetap kita saling bagi di kas Desa adat. Jadi untuk pengelolaan keuangan modern sebenarnya saya sekarang kebetulan wajah-wajah muda jadi sangat siap sekali, jadi demi tercapai pertama transparansi keuangan Desa adat tersebut.

P19 : Bagaimana mengatasi gap antara kompetensi teknis yang dibutuhkan dengan kapasitas SDM yang ada?

NA : untuk menghadapi gap tersebut titang tetap melaksanakan koordinasi, sosialisasi dengan rekan-rekan tiyang di *Prajuru* untuk tetap saling evaluasi saling koordinasi terkait kegiatan-kegiatan itu. Jadi gapnya ada tapi sedikit, jadi bisa teratasi.

P20 : Apa harapan Bapak untuk pengembangan pengelolaan keuangan desa adat ke depan?

NA : harapan Titiang (saya) untuk pengelolaan keuangan tetap yang pertama untuk pelatihan-pelatihan biar dilaksanakan secara offline, kedua pemerintah provinsi biar mengadakan sidak langsung ke desa-desa adat terkait laporan-laporan keuangan yang ada di desa adat jadi Titiang (saya) sangat siap sekali untuk disidak atau apapun yang terjadi, jadi apa juklak dan juknisnya Titiang (saya) siap menerima karena menurut Titiang (saya) sekarang desa adat Alapsari terutama untuk transparansi anggaran memang sangat-sangat transparan terkait di desa adat Alapsari

P21 : Apa kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa adat berbasis *Sad Kerthi*?

NA : Kunci dari pengelolaan keuangan desa adat berbasis sad kerti, pertama, warga desa harus aktif terkait keberadaan di parahyangan, pawongan dan pelemahan. Jadi, dari masukan-masukan warga desa atau masukan-masukan pengeliris, kita serta merta akan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan dari *Sabha Desa* juga berperan sangat penting untuk merencanakan, jadi apa-apa yang minimal rusak atau apa-apa yang harus diperbaiki dan itu penting sekali peranan dari *Krama Desa* adat Alapsari.

P22 : Apa yang bisa dipelajari di desa adat Alapsari oleh desa adat lain?

NA : Untuk pengelolaan keuangan yang bisa ditiru oleh desa adat lain seperti sekarang karena Tiang (saya) melakukan contoh di desa-desa lain, mungkin belum. Tiyang untuk penempak kulkul utawi penajung batu punika yang dulunya itu dibagi oleh yang datang-datang nyaksinin, tiyang full sekarang untuk penempak kulkul punika masuk murni ke desa adat. Jadi untuk menambah khas di desa adat, jadi untuk kuleman atau undangan dari *Krama Desa* harus disetiakan suksma dan besarnya itu tergantung kerelaan *Krama*. Jadi seperti itu, khas yang masuk memang untuk desa adat tidak dibagi lagi oleh *Prajuru* yang lain.

P23 : Dari pengelolaan keuangan dana BKK, apa yang dapat dipelajari?

NA : Di dalam pengelolaan keuangan, selain titiang mengadakan *Paruman-Paruman* dari pra *Paruman* sareng *Prajuru*, para pengelingsi, kedua *Paruman* madia, *Paruman* agung, tiyang juga akan menampilkan hasil dari *Paruman* Punika lewat poster utawi flyer yang di tempat-tempat yang strategis, jadi semua *Krama Desa* bisa mengakses Punika. Dan yang kedua, kebetulan di Desa Adat Alapsari juga ada Facebook utawi media sosial, kita punya Alapsari Chanel dan akan ditampilkan juga di sana. Jadi orang-orang lain utawi *Krama Desa* Adat Alapsari yang merantau khususnya yang di luar pulau Bali, jadi juga bisa mengetahui isi laporan keuangan dan demi mencapai transparansi di desa Adat Alapsari.

P24 : Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan desa adat?

NA : Untuk terkait pengelolaan keuangan desa adat, Tiang (saya) senantiasa tetap dengan tangan terbuka meminta bantuan dari, pertama dari provinsi, kedua dari kabupaten terkait pelaporan atau pendampingan terkait laporan keuangan Punika, dan ketiga, Tiang (saya) tetap meminta bantuan *Sabha Desa* dan *Krama Desa* adat untuk mengecek secara langsung keberadaan laporan keuangan di desa adat Alapsari.



TRASKRIP WAWANCARA B (*PATENGEN* DESA ADAT ALAPSARI)

Kode Narasumber	B
Nama Narasumber	Ketut Sulaba
Jabatan / Peran	<i>Patengen</i> (Bendahara Desa Adat)
Tanggal Wawancara	1 Februari 2026
Waktu Wawancara	17.35 – 18.05 WITA
Durasi	30 menit
Lokasi Wawancara	Rumah <i>Patengen</i> , Desa Adat Alapsari Jinengdalem
Pewawancara	Peneliti
Bahasa	Indonesia / Bali (Campur kode / <i>Code-switching</i>)

A. Catatan Lapangan Pewawancara (*Field Note*)

Catatan Kontekstual:

Wawancara dilakukan di rumah *Patengen* pada malam hari setelah wawancara dengan *Bendesa Adat* selesai. Waktu wawancara relatif singkat (30 menit) mengingat durasi waktu yang tersedia. Narasumber merupakan pejabat baru yang mulai menjabat pada akhir tahun 2024 sehingga pengalamannya masih terbatas. Narasumber menjawab dengan jujur termasuk mengakui keterbatasan kapasitasnya dan bahwa belajar aplikasi SIKUAT secara otodidak. Narasumber menggunakan bahasa Bali halus (singkatan dan istilah teknis adat) bercampur bahasa Indonesia.

B. Hasil Wawancara (Verbatim)

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P1: Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang digunakan saat ini? (manual/digital)

NB : Indik sistem pengelolaan keuangan ring desa adat niki berbasis aplikasi, aplikasi sikuat Sistem keuangan desa adat.

P2 : Dokumen apa saja yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan?

NB : Kalau di desa adat, sesuai dengan peraturan kami hanya memakai kuitansi, nota, nota pesanan, dan bukti foto barang yang dibeli.

P3 : Bagaimana proses verifikasi dan persetujuan pengeluaran dilakukan?

NB : Mangkin titiyang dari semenjak titiyang kajudi dados *Patengen* puniki tahun 2024 akhir puniki. Untuk prosesnya disetujui oleh Jro *Kelian* dan yang berbelanja bisa si TPK atau tim pengelola kegiatan.

P4 : Bagaimana Bapak/Ibu menerjemahkan nilai-nilai *Sad Kerthi* menjadi alokasi anggaran yang konkret?

NB : Melalui kearifan lokal yang mungkin atau biasa disebut di sini tradisi atau dresta desa adat Alapsari. Nike dianggaran terbagi menjadi tiga belanja: belanja di parahyangan, belanja pawongan, dan belanja palemahan. Dari tiga belanja niki sudah termasuk dari Atma Kerti, Jana Kerti, dan pelemahan.

P5 : Berapa persen alokasi anggaran untuk kegiatan spiritual (*Atma kerthi*)?

NB : Untuk Atma Kerti di tahun 2025 yang sudah tiyang laporkan niki sebesar 55 persen dari 200 juta yang dikasih untuk belanja program.

P6 : Berapa persen untuk program pemberdayaan masyarakat (*Jana kerthi*)?

NB : Untuk Jana Kerti kemarin yang dialokasikan ring pawongan sebesar 30 persen.

P7 : Berapa persen untuk program pelestarian lingkungan (dimensi Palemahan)?

NB : Nike termasuk dengan pemeliharaan Danu Kerti yang ada di dalamnya sebesar 15 persen.

P8 : Bisakah dijelaskan tahapan perencanaan keuangan dari awal hingga penetapan APB Desa Adat?

NB : Untuk proses Untuk proses pengamprahan dana Hibah semesta berencana Di tahun 2025 Nike RAT-nya dikirim Satu tahun sebelumnya Itu diajukan tahun

2024 Dan ditetapkan di tahun 2025 Beserta sekalian pengajuan RAT Tahun 2026. Seperti yang katakan Untuk tahun depan Nike RAT dibuat di tahun sebelumnya. Untuk membuat RAT Nike Didahului dengan *Paruman* madia Untuk penyerapan, Penyerapan aspirasi apa yang dianggarkan Untuk di tahun kedepannya Dan di tahun berjalan Di awal tahun Nike baru ada Penetapan APPD tahun itu sendiri

P9 : Bagaimana proses pelaksanaan dan pencairan dana untuk setiap kegiatan?

NB : Untuk setiap kegiatan Jika Nike Pembangunan, Jika Nike pembangunan Akan dibuatkan tim pengelola kegiatan Yang nantinya Tetap dilakukan oleh *Krama* Yang berpotensi Untuk bisa membangun Dan belanja Di toko-toko Yang ada di desa adat Alapsari Dan dibayarkan oleh tiyang sendiri Oleh petenggan di toko tersebut

P10 : Bagaimana sistem penatausahaan yang dilakukan? (buku kas, jurnal, dll)

NB : Untuk dana Semesta berencana Niki Prosesnya dari Dari pencairan Di DPMA Kami memasukkan di aplikasi. Untuk Proses realisasi pendapatan Setelah kami Masukkan di pendapatan, Kami masukkan Kepenarikan kas Berapa yang akan dipakai Dari dana yang sudah turun. Setelah Nike Wau kerealisasi belanja Sesuai dengan Kuitansi yang dibuat Atau belanja Yang dibuat. Untuk buku kas umum Nike secara otomatis Setelah kami membuat Input di ketiga Nike di buku kas secara otomatis Di aplikasi Sikuat tercatat. Sampai saat ini Kami di desa adat Belum ada pemotongan Untuk pajak

P11 : Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan?

NB : Untuk proses Pelaporan dana APBD semesta berencana Niki Dilakukan di akhir tahun Maksimal tanggal 10 Januari Tahun berikutnya Nike dikirim ke DPMA Dan laporannya Bisa di Download di aplikasi Sikuat Yang sebelumnya Sudah kita input. Yang sudah kita input Belanja dan realisasinya Berserta dengan Foto-foto kegiatan pembangunan Jika ada pembangunan Dan untuk bukti-bukti Pendukung seperti Kuitansi Disimpan di Intern desa adat Jikalau nantinya Ada pemeriksaan berlanjut

P12 : Kepada siapa saja laporan keuangan disampaikan dan dalam format apa?

NB : Seperti yang katakan tadi Laporan Nike Yang pertama Dalam bentuk hard copy yang dijilid Dikirim ke DPMA Provinsi Bali Selanjutnya Untuk di *Krama Desa* Sebelumnya tiyang melakukan *Paruman* Madia, Bersama *Sabha Desa*, *Kertha Desa* Klian Banyar Adat, *Kelian* tempek. Setelah Nike Wau tiyang ngelaksanayang *Paruman* Agung Bersama *Krama Desa* adat Alapsari

P13 : Bagaimana Bapak/Ibu memastikan prinsip akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan?

NB : Seperti yang sudah tiyang lakukan di tahun kemarin, mungkin jika TPK nike berbelanja, bendahara dikasih nota belanjanya. Mungkin tiyang cek untuk membuat foto kegiatan beserta *Kelian* desa adat Alapsari.

P14 : Mekanisme apa yang digunakan untuk memastikan transparansi penggunaan dana?

NB : Seperti yang sudah dilakukan mungkin *Paruman* madya. Dan yang akan dilakukan adalah *Paruman Krama Desa* adat Alapsari. Dan yang sudah dirancang untuk pembuatan baliho template baliho yang akan dipasang di jalan raya atau di Pura Kayangan tiga yang bisa dilihat oleh *Krama Desa* Adat Alapsari beserta akan dipost melalui Facebook Alapsari Channel yang bisa dilihat oleh banyak *Krama* yang ada dari perantauan.

P15 : Apakah pernah ada audit internal atau eksternal? Bagaimana prosesnya?

NB : Untuk tahun ini atau tahun kemarin, semenjak tiang kajudi dados *Patengen*, belum ada audit eksternal. Internalnya hanya dari *Sabha Desa* dan *Kertha Desa* seperti kemarin di pertanggungjawaban.

P16 : Bagaimana Bapak/Ibu menyeimbangkan akuntabilitas spiritual (dharma) dengan akuntabilitas administratif?

NB : Disanalah Mungkin dilema Ngaturang ayah beserta tugas Tugas dari *Patengen* desa adat. Memang sih Dari pertanggungjawaban Sebelum melakukan kegiatan tiyang melakukan Persembahyangan bersama Untuk mempertanggungjawabkan Kegiatan Beserta keuangan Kepada ida sang hyang widhi Atau Sesusunan sane melinggih di kayangan tiga Desa adat Alapsari Baru Langsung Bersama *Paruman Krama Desa* adat

P17 : Bagaimana peran *Sabha Desa* atau Prahulu dalam memberikan legitimasi spiritual atas keputusan keuangan?

NB : Di sana mungkin ada peran *Sabha Desa* atau prahulu yang ada di desa adat Alapsari. Jikalau ada kegiatan yang melibatkan *Krama Desa* dan keuangan, tetap sebagai mendahulukan ngaturang ayah. Untuk nantinya jikalau ada keuangan-keuangan yang tidak termasuk di dalamnya, untuk menjadi karma pala yang diterima selanjutnya.

P18 : Apa tantangan teknis yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan?

NB : Yang pertama Tahun sebelumnya Mungkin formatnya. Format pelaporan Pengamperahan Untuk di aplikasi, Tetapi untuk di tahun ini Sudah diperbaiki Format ini sudah bisa Langsung di download Di aplikasi Sikuat. Ini tantangan pertama Yang kedua tantangannya Mungkin menghadapi masyarakat awam Menghadapi masyarakat awam Yang mungkin Tidak tahu bagaimana Proses pelaporan Atau pun pembuatan SPJ untuk Dana hibah desa adat Alapsari

P19 : Apakah ada kesulitan dalam menggunakan format pelaporan yang diwajibkan oleh Pergub No. 2 Tahun 2023?

NB : Seperti apa yang katakan tadi, semenjak jadi *Patengen* desa adat di tahun 2024, format pelaporan yang diberikan melalui grup WhatsApp bisa berbeda-beda. Namun saat ini di tahun 2026, format ini sudah bisa di-download di aplikasi SIKUAT dengan hanya meng-input nominal-nominal atau nomor-nomor surat yang bisa dicari di *Penyarikan* desa adat.

P20 : Pelatihan atau kompetensi apa yang menurut Bapak/Ibu masih diperlukan?

NB : Kalau tiang sendiri mengalami sampai dengan detik ini, tiang hanya otodidak belajar untuk memakai aplikasi SIKUAT. Mungkin bisa dilakukan pembelajaran atau pemahaman offline langsung dari DPMA untuk memakai aplikasi SIKUAT.

P21 : Apa kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa adat?

NB : Menurut tiang, untuk kunci keberhasilan itu terlihat dari anggaran yang kita pasang dan belanja yang kita lakukan cukup untuk melakukan kegiatan sampai dengan selesai.

P22 : Apa yang bisa dipelajari di desa adat Alapsari oleh desa adat lain?

NB : Mungkin bisa diimplementasi, mungkin setelah ini desa adat Alapsari akan membuat template atau baliho untuk dipasang dan bisa dilihat di Pasar desa adat Alapsari beserta Facebook Alapsari Channel yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

P23 : Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan desa adat?

NB : Nike sudah menjadi tantangan ke depan untuk dana ini untuk pembangunan tidak bisa didanai dari dana ini sebanyak 100%. Kalau bisa diperbesar mungkin untuk pembangunan 100% dari Dana APBD Semesta Berencana.



TRANSKRIP WAWANCARA C (*PENYARIKAN* DESA ADAT ALAPSARI)

Kode Narasumber	C
Nama Narasumber	Kadek Nova Budiasa
Jabatan / Peran	<i>Penyarikan</i> (Sekretaris Desa Adat)
Tanggal Wawancara	3 Februari 2026
Waktu Wawancara	18.00 – 18.20 WITA
Durasi	20 menit
Lokasi Wawancara	Rumah <i>Penyarikan</i> , Desa Adat Alapsari Jinengdalem
Pewawancara	Peneliti
Bahasa	Indonesia / Bali (Campur kode / Code-switching)

A. Catatan Lapangan Pewawancara (*Field Note*)

Catatan Kontekstual:

Wawancara dilakukan di rumah *Penyarikan* pada malam hari. Narasumber merupakan *Prajuru* baru yang mulai menjabat pada akhir tahun 2024. Narasumber memiliki pemahaman yang baik tentang sistem dokumentasi keuangan berbasis aplikasi SIKUAT. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adat. Narasumber berbicara dengan lancar dan terstruktur.

B. Hasil Wawancara (Verbatim)

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P1 : Bagaimana sistem dokumentasi keuangan yang dijalankan di desa adat ini?

NC : Yang jelas, pertama, bagaimana sistem dokumentasi keuangan yang dijalankan di Desa Adat ini tentunya sudah diatur dalam Perda Nomor 4 Provinsi Bali, yang mana di sana tentang aplikasi SIKUAT. Jadi semua dana desa adat atau yang disebut dengan dana bantuan keuangan khusus tentang semesta berencana di sana ada 300 juta langsung dari aplikasi SIKUAT. Di sana ada tahap yang namanya 3 tahap: tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga.

P2 : Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan?

NC : Terkait dokumen, tentunya dalam suatu perencanaan kan kita tetap mengutamakan yang namanya suatu perencanaan. Terus dari perencanaan itu, kita mempelajari apa-apa yang perlu kita siapkan. Jadi setelah perencanaan ada proses pelaksanaan. Setelah pelaksanaan ada sistemnya yang namanya dokumen pelaporan. Nah, sepertinya secara besar ada 3 dokumen yang perlu kita siapkan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa.

P3 : Bagaimana format laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat?

NC : Untuk format laporan, sama seperti yang tiyang sampaikan tadi bahwasanya ini sudah ada aplikasinya yang namanya SIKUAT, Sistem Informasi Keuangan Umat Adat. Nah di sana sudah diatur yang mana ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Itu yang nantinya untuk kita sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan adat, baik itu melalui kegiatan parahyangan, baik itu kegiatan pembangunan, maupun kegiatan yang mengatur hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan.

P4 : Apakah berbeda dengan format laporan kepada pemerintah daerah?

NC : Untuk pemerintah daerah, ini tidak ada perbedaan. Jadi yang jelas kita pelaporan untuk setiap dana yang diterima itu tetap melalui aplikasi SIKUAT saja. Jadi di sana sudah diatur secara nomenklatur, yang mana di sana ada namanya *Sad Kerthi Atma kerthi*, *Danu kerthi*, *Jana kerthi*, dan selanjutnya. Di sana ada hubungan daripada manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan palemahan.

P5 : Bagaimana mekanisme penyampaian informasi keuangan kepada *Krama*?

NC : Terkait pelaporan, jadi tentunya mekanisme di adat yang sudah berjalan selama tahun 2024 dan 2025 tentunya sebelum pelaporan ke *Krama* jadi kita duduk bersama dulu melalui *Kelian* Desa Adat, jadi *Prajuru* Desa Adat lainnya seperti *Sabha Desa*, Kerta desa, dan juga *Prajuru* lainnya. Jadi kita rapat yang namanya *Paruman* madia dulu. *Paruman* madia kita diskusi dulu dengan *Prajuru*, jadi setelah itu sudah fix, masukan-masukan kita terima, kita evaluasi, baru kita sampaikan dengan *Krama* yang namanya *Paruman* agung.

P6 : Seberapa sering dilakukan *Paruman* untuk membahas pertanggungjawaban keuangan?

NC : Untuk keseringan dilakukan *Paruman* itu pertama tergantung dari aktivitas yang kita laksanakan. Misalnya contohkan ada kegiatan kemarin piodalan, itu dia laporkan saat selesai piodalan. Nah khususnya untuk kegiatan pembangunan dilaporkan setelah kegiatan itu juga berlangsung. Nah yang terakhir secara mekanisme pelaporan dana BKK itu tetap satu tahun sekali. Jadi sebagian besar hanya satu kali dalam setahun untuk *Paruman* ke *Krama* terkait laporan keuangan desa adat.

P7 : Bagaimana respons masyarakat terhadap laporan keuangan yang disampaikan?

NC : Jadi respon masyarakat atau *Krama Desa* tentunya sangat mengapresiasi daripada kinerja pemerintahan desa adat yang tentunya dimotori adalah sebagai pemucuk yaitu *Kelian* desa adat. Kita karena selalu berkoordinasi, berkomitmen untuk menciptakan transparansi pengelolaan dana desa adat kepada *Krama*. Jadi setelah kita laporkan, sementara sudah berjalan ini astungkara baik-baik saja. Jadi tidak ada permasalahan yang signifikan.

P8 : Apakah ada mekanisme untuk menampung keluhan atau pertanyaan masyarakat tentang keuangan?

NC : Jadi kami di desa adat tetap membuka ruang untuk yang namanya koreksi. Baik itu melalui aspirasi yang disampaikan melalui *Krama Desa*, baik itu *Krama Desa* melalui *Prajuru* lainnya, baik itu *Krama Desa* melalui langsung di *Paruman* LPJ. Jadi kita sangat terbuka untuk itu, untuk menciptakan yang namanya pengelolaan transparansi, pengelolaan keuangan desa adat. Selain itu kami juga punya di Facebook ada Alapsari Channel.

P9 : Bagaimana koordinasi antara Bendesa, Bendahara, dan Sekretaris dalam pengelolaan keuangan?

NC : Baik untuk koordinasi jadi antara kelihan desa, *Penyarikan*, maupun patengan, atau wakil juga di petajuh. Jadi kita tentunya segala pemerintahan desa adat itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa komunikasi, koordinasi yang baik. Jadi selama ini sudah berjalan, jadi kami selalu mengutamakan yang namanya koordinasi. Komunikasi baik itu melalui *Kelian* desa ke kepatengan, baik itu *Kelian* desa ke *Penyarikan*, ke petajuh. Jadi tentunya selama ini sudah terbangun dengan baik.

P10 : Apakah ada rapat rutin untuk membahas keuangan?

NC : Untuk rapat rutin, jadi seperti yang saya sampaikan, rapat rutin terkait keuangan desa itu pertama kita akan dilaksanakan di bulan Januari. Setelah kita melaksanakan LPJ atau laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan desa yang sebelumnya, kita juga menyampaikan terkait rencana kerja di tahun selanjutnya. Nah dari sana kita akan tahu juga apa yang akan kita laksanakan di *Prajuru*, apa yang akan nantinya masukan dari *Prajuru* lainnya itu kita tampung.

P11 : Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam memastikan nilai-nilai *Sad Kerthi* terdokumentasi dengan baik?

NC : Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi yang kebetulan di Provinsi Bali kita kan ada namanya *Sad Kerthi*. Jadi secara tidak langsung dari *Sad Kerthi* itu dari 6 itu bisa saja langsung 3 dari *Sad Kerthi* itu bisa kita tertanamkan. Contohnya *Atma kerthi* selain kegiatan secara langsung adalah moral daripada semua elemen masyarakat. Kedua, *Danu kerthi* bagaimana kita selama ini sudah berjalan memelihara sumber air yang ada di desa kita, terutama Pura Taman Beji Yeh Anakan. Terus ada *Jana kerthi* sistemnya adalah gotong royong melalui musyawarah baik itu tingkat sekaa Truna, tingkat *Prajuru*, tingkat santi dan sebagainya.

P12 : Apa kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa adat?

NC : Kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan desa adat tentunya, yang pertama adalah komunikasi yang baik. Kita membangun komunikasi baik itu

melalui pemucuk yaitu *Kelian* desa kepada seluruh *Prajuru* lainnya yang ada di bawahnya. Dengan itu tentunya segala pengelolaan keuangan desa adat akan terlaksana dengan baik. Karena kita kan ada aplikasi SIKUAT, jadi kita sampaikan itu tentunya dengan transparansi, keterbukaan itu akan terbangun dengan baik. Itu kuncinya.

P13 : Apa yang bisa dipelajari di desa adat Alapsari oleh desa adat lain?

NC : Oke, jadi pengalaman yang sudah berjalan tentunya desa adat Alapsari jadi kita kebetulan *Prajuru* baru di tahun 2024 akhir, pertama kita selalu mengutamakan yang namanya transparansi laporan kepada *Krama Desa*. Jadi setelah kegiatan, kita selalu menempel yang namanya sumber-sumber pendapatan, pelaksanaannya bagaimana, pelaporannya bagaimana. Kita selalu mengumumkan itu biasanya di grup-grup WhatsApp seperti di grup Dadia. Nah juga ada kami di Facebook yang namanya Alapsari Channel.

P14 : Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan desa adat?

NC : Terkait pengelolaan keuangan desa adat, jadi biasanya kalau kita berbicara ke *Krama Desa* itu kan sifatnya masih majemuk. Jadi ada *Krama* yang memang mohon maaf ada yang sumber daya manusianya sudah lebih, ada kurang jadi kita terkadang di sana masih agak sulit menyampaikan kalau kita berbicara dengan aplikasi SIKUAT karena di sana lebih merinci. Jadi kita biasanya kalau pelaporan ke *Krama* itu ada tiga hal penting yang kita sampaikan: pendapatan, belanja, dan saldo. Biasanya *Krama* kalau seperti itu lebih mudah dimengerti.

TRANSKRIP WAWANCARA D (*SABHA DESA* ADAT ALAPSARI)

Kode Narasumber	D
Nama Narasumber	Ketut Mertana
Jabatan / Peran	Anggota <i>Sabha Desa</i> Adat
Tanggal Wawancara	11 Februari 2026
Waktu Wawancara	14.54 – 15.15 WITA
Durasi	21 menit
Lokasi Wawancara	Rumah <i>Sabha Desa</i> , Desa Adat Alapsari
Pewawancara	Peneliti
Bahasa	Indonesia / Bali (Campur kode / <i>Code-switching</i>)

A. Catatan Lapangan Pewawancara (*Field Note*)

Catatan Kontekstual:

Wawancara dilakukan di rumah *Sabha Desa* pada siang hingga sore hari.

Narasumber merupakan tokoh senior di desa adat yang memiliki pemahaman mendalam tentang *Awig-Awig* dan perarem. Narasumber menekankan pentingnya pengawasan triwulan dan ketaatan pada aturan formal pemerintah provinsi. Suasana wawancara formal dan narasumber tampak berhati-hati dalam setiap pernyataannya.

B. Hasil Wawancara (Verbatim)

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P1 : Bagaimana peran *Sabha Desa* dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa adat?

ND : Baik, terima kasih. Tiyang sebagai *Sabha Desa* tentang pengelolaan keuangan, tiyang tetap mengikuti peraturan tentang keuangan yang sesuai dengan juklak dan juknisnya dari pemerintah provinsi. Yang tentunya di sini adalah tentang keuangan dari BKK Provinsi. Nah niki tiyang sesuai dengan nomenklatur yang ada tiyang jalankan di desa adat. Apa yang menjadi pembangunan yang mungkin akan diselenggarakan oleh *Kelian* desa adat, jadi di sini *Sabha Desa* perlu untuk mengingatkan tentang mengikuti aturan-aturan yang sudah tercantum dari provinsi.

P2 : Mekanisme pengawasan seperti apa yang dilakukan?

ND : Tentang pengawasannya ini, biasanya tiyang selaku *Sabha Desa* tiyang tetap menyarankan dari *Kelian* desa ketika ada penggunaan-penggunaan dari keuangan itu, tiyang tetap menyarankan untuk tetap mengadakan rembuk ataupun misalnya ke *Paruman* dumun. Jadi sesuai dengan apa yang akan dipakai dalam keuangan tersebut artinya biar penggunaannya itu tepat guna.

P3 : Seberapa sering *Sabha Desa* melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan?

ND : Untuk pengelolaan keuangan itu biasanya tiyang selaku anggota *Sabha Desa* tetap mengingatkan juga terkait *Kelian* desa adatnya jadi tetap memantau. Ketika untuk pengelolaan keuangannya itu biasanya tiyang mengevaluasinya setiap 3 bulan atau triwulan dalam pelaksanaannya nanti kita evaluasi setiap 3 bulannya.

P4 : Bagaimana *Sabha Desa* memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan *Awig-Awig* dan nilai-nilai adat?

ND : Yang dilakukan itu barang tentu sesuai dengan perarem. Jadi desa adat itu kan punya perarem dan *Awig-Awig* jadi biar tidak keluar dari perarem tersebut yang disetujui oleh *Paruman* agung terutama di *Krama Desa* yang tetap menggunakan aturan di *Awig-Awig* tersebut, jadi biar tidak nanti ketika ada permasalahan artinya biar tidak dari *Kelian* desa atau *Sabha Desa* atau *Krama Desa* terlalu menyalahkan kepada yang mengerjakan kegiatan.

P5 : Bagaimana peran nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam memperkuat pengawasan?

ND : Kalau dimasukkan dalam nilai-nilai *Sad Kerthi* itu artinya seperti yang terdapat di dalam bagian-bagian *Sad Kerthi* misalnya di sini dalam nilai-nilai dari alam, misalnya tentang *Wana kerthi*, *Jana kerthi*, *Danu kerthi*, dan lain-lain sebagainya, artinya tetap mengacu pada nilai-nilai yang ada di *Sad Kerthi* tersebut jadi biar kegiatan itu menyambung dengan penyucian daripada alam yang ada di desa adat.

P6 : Apakah pernah ada temuan penyimpangan? Bagaimana penanganannya?

ND : Nah, selama tiyang niki menjadi anggota *Sabha Desa* mudah-mudahan tidak ada, Dan belum pernah ada tentang penyimpangan. Nah ketika pun itu ada penyimpangan, kita telusuri dulu. Kalau memang itu ada penyimpangan-penyimpangan kecil, ya tetap kita rangkul bersama-sama di mana kekurangan dan kesalahan mungkin kita ajak di sana untuk memperbaiki dan itu menjadi suatu pengalaman tiyang sebagai *Sabha Desa* dan anggota semuanya.

P7 : Menurut *Sabha Desa*, sejauh mana pengelolaan keuangan saat ini sudah sejalan dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*?

ND : Pengelolaan keuangan seperti sekarang ini tiyang pantau, tiyang lihat sampun berjalan sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai daripada *Sad Kerthi* tersebut. Jadi itu sudah mencakup semuanya, dan itu pun bila nanti ada misalnya kekurangan-kekurangan atau perlu untuk diimbangi, nanti kita bersama-sama di sana untuk memperbaikinya.

P8 : Apa yang menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan sudah memenuhi akuntabilitas spiritual?

ND : Tentang indikator yang memenuhi akuntabilitas ini, untuk sekarang ini kan sudah ada karena seperti tiyang sampaikan tadi niki itu kita tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, jadi tetap tidak menyalahi aturan sehingga apapun yang menjadi nilai-nilai tersebut jadi biar berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan.

P9 : Bagaimana *Sabha Desa* memberikan legitimasi terhadap keputusan-keputusan keuangan yang diambil?

ND : *Sabha Desa* dalam hal ini mengambil legitimasinya dengan pengelolaan keuangan yang ada itu jadi sesuai dengan tiyang diharapkan niki. Jadi tetap

mengambil keputusan bersama, jadi tetap mengadakan pemantauan, tetap melihat jadi apa-apa yang perlu diperbaiki. Jadi itu pembangunannya itu kalau memang itu menggunakan keuangan itu kita tetap mengadakan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek sehingga itu bisa nanti meringankan kegiatan-kegiatan yang ada di desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada di *Krama Desa*.

P10 : Apa kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa adat?

ND : Kunci keberhasilannya jadi menurut tiyang sebagai anggota *Sabha Desa* tentunya tetap mengacu pada nilai-nilai *Sad Kerthi* yang ada sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan dari provinsi misalnya tentang penggunaan dana BKK. Nanti itu disampaikan kepada *Krama*, kalau sudah itu disepakati dan disetujui, baru kita laksanakan kegiatan tersebut misalnya dalam hal pembangunan ataupun hal-hal yang lainnya sehingga semuanya itu bisa membuat *Krama Desa* itu menjadi menerima, aman, dan berkesinambungan.

P11 : Apa yang bisa dipelajari di desa adat Alapsari oleh desa adat lain?

ND : Menurut tiyang sebagai anggota *Sabha Desa* jadi yang perlu tiyang pelajari ya sudah barang tentu jadi hal-hal yang menyangkut tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh *Krama Desa* setiap hari ataupun hal-hal penting yang ada hubungannya dengan pembangunan untuk membangun nilai-nilai *Sad Kerthi* tersebut. Jadi supaya ke depannya apapun yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi perintah tiyang sebagai anggota *Sabha Desa* jadi tetap diterima oleh *Krama Desa* semuanya.

P12 : Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan desa adat?

ND : Hal-hal lain yang perlu tiyang sampaikan, tetap tiyang meminta mungkin dalam hal ini yang punya kepentingan misalnya dalam hal penggunaan dana keuangan desa adat jadi tiyang tetap misalnya dengan anggota selalu mengedepankan tanggung jawab, jadi apa namanya yang jujur. Dan juga tiyang menginginkan biar kegiatan-kegiatan yang ada di *Krama Desa* khususnya yang menyangkut pembangunan baik itu tempat-tempat suci jadi

tetap tiyang menginginkan biar ada pembinaan-pembinaan ataupun pelatihan-pelatihan yang disarankan oleh pembina provinsi terkait adat.



TRANSKRIP WAWANCARA E (*KRAMA DESA ADAT ALAPSARI*)

Kode Narasumber	E
Nama Narasumber	Ketut Widiassa
Jabatan / Peran	<i>Krama</i> (Anggota Masyarakat Adat)
Tanggal Wawancara	11 Februari 2026
Waktu Wawancara	14.15 – 14.40 WITA
Durasi	25 menit
Lokasi Wawancara	Pura Bukit, Desa Adat Alapsari
Pewawancara	Peneliti
Bahasa	Indonesia / Bali (Campur kode / <i>Code-switching</i>)

A. Catatan Lapangan Pewawancara (*Field Note*)

Catatan Kontekstual:

Wawancara dilakukan di Pura Bukit Desa Adat Alapsari setelah dilaksanakan *Paruman* agung untuk pembahasan LPJ Keuangan Desa Adat Alapsari tahun 2025. Suasana wawancara informal dan santai di lingkungan pura. Narasumber adalah *Krama* aktif yang telah mengikuti *Paruman* sejak tahun 2007. Narasumber memiliki pandangan yang kritis namun tetap apresiatif terhadap pengelolaan keuangan desa adat. Narasumber berbicara dengan terbuka dan menyampaikan beberapa saran konstruktif. Lokasi wawancara di pura memberikan konteks kultural yang kuat dalam percakapan.

B. Hasil Wawancara (Verbatim)

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber | [Tema:...]= Kode Tematik

P1 : Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang pengelolaan keuangan desa adat?

NF : Menurut tiyang, pengelolaan keuangan desa adat seharusnya harus mengikuti aturan ataupun regulasi-regulasi tentang keuangan. Kenapa? Karena keuangan itu sangat rentan sekali disalahgunakan kalau menyangkut tentang uang. Kalau tidak ada aturan atau rambu-rambu, itu sangat rentan sekali untuk ada penyimpangan. Pemahaman tentang aturan sangat perlu dipahami oleh penyelenggara atau pengelola keuangan desa adat itu.

P2 : Apakah Bapak/Ibu mengetahui dari mana sumber pendapatan desa adat?

NF : Yang saya tahu sumber pendapatan desa adat: yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dari potensi-potensi desa yang dikelola oleh desa adat itu sendiri misalnya saja pengelolaan lahan parkir, usaha bengkel, ataupun usaha cuci motor. Terus yang ke-2 pendapatan dari provinsi itu melalui dana BKK-nya, sekarang setiap adat mendapat BKK provinsi dari dinas yang terkait. Dan sumber dari keuntungan dari pengelolaan lembaga keuangan itu sumber pendapatan desa adat.

P3 : Apakah Bapak/Ibu tahu program-program apa saja yang didanai dari APB Desa Adat?

NF : Yang saya tahu kalau BKK provinsi itu sejak dikucurkan ke desa adat sangat terbantu sekali dalam hal operasional penyelenggaraan kegiatan desa adat itu sendiri. Contohnya untuk honor *Prajurit*, seperti itu ataupun kegiatan rutin yang digunakan oleh desa adat terkait dengan kegiatan di desa adat itu sendiri. Terus ada kegiatan-kegiatan insidental seperti piodalan ataupun sebagainya yang secara sah dilakukan oleh desa adat, tentunya dengan persetujuan *Krama*.

P4 : Seberapa mudah Bapak/Ibu mengakses informasi tentang keuangan desa adat?

NF : Kalau saat ini yang saya tahu kebetulan saat ini kan zaman digitalisasi ya, saya lihat desa adat Alapsari Jinengdalem ini sudah mengikuti zaman kekinian. Dalam artian, media sosial itu sangat bagus digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak, terutama untuk *Krama Desa* adat Alapsari Jinengdalem. Yang ke-2 melalui *Paruman-Paruman* seperti itu, itu sangat

penting sekali karena agar masyarakat utawi *Krama* tahu seperti apa sih pengelolaan dari pendapatan atau anggaran desa adat itu sendiri.

P5 : Apakah pernah mengikuti *Paruman* yang membahas pertanggungjawaban keuangan?

NF : Sejak tahun 2007, sejak saya menikah, sudah beberapa kali saya ikuti *Paruman*. Sampai saat ini pun saya baru mengikuti *Paruman* terkait dengan LPJ keuangan desa adat tahun 2025.

P6 : Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa adat?

NF : Kalau terkait dengan proses perencanaan penggunaan dana desa adat, mungkin saya selaku *Krama* tidak tahu secara nominal. Tapi secara program, untuk program desa adat ke depan, tentu saya dilibatkan dalam artian diberikan informasi oleh desa adat itu sendiri terkait program-program yang akan dilakukan ke depan. Dan tentunya program itu pasti membutuhkan anggaran atau biaya, nah itu silakan dari *Prajuru* mengakomodir seperti apa baiknya nanti kan nanti ada pertanggungjawaban kembali kepada *Krama* setelah selesai dari istilahnya pembangunan ataupun program tersebut.

P7 : Apakah pernah menyampaikan usulan program? Bagaimana prosesnya?

NF : Baik, kalau usulan program terus terang *Prajuru* saat ini kebetulan saya kenal ya teman sejawat lah. Baru dia melantik sudah saya bisikkan dengan program-program ke depan seperti apa sih desa adat ini ke depannya. Contohnya saja seperti petunon kemarin baru setelah dilantik saya sudah langsung gimana untuk petunonnya seperti itu. Ternyata usulan itu di tahun 2026 ini sudah masuk proposalnya ke pemerintah. Mudah-mudahan terealisasi itu salah satu usulan program. Prosesnya memang mungkin *Prajuru* itu sendiri yang punya semangat dan *Krama* juga harus mendukung.

P8 : Program apa saja yang Bapak/Ibu rasakan manfaatnya secara langsung?

NF : Baik, terima kasih. Kalau program yang dirasakan manfaatnya, tentu manfaatnya untuk *Krama* itu sendiri semua *Krama*. Contohnya saja dalam hal pebecikan atau perbaikan bangunan pura pebecikan wewidangan-wewidangan di kayangan tiga ataupun wewidangan milik desa adat. Itu sudah

saya rasakan. Terutama kan saat perbaikan pebecikan pura, setra seperti itu, itu jauh sekarang lebih bagus jika kita melihat dari hasil pembangunan di desa adat Alapsari ini.

P9 : Bagaimana menurut Bapak/Ibu alokasi dana untuk kegiatan spiritual/upacara adat? (*Atma kerthi*)

NF : Kembali ke aturan-aturan ya yang sudah ditentukan oleh dinas terkait di provinsi, dan silakan itu kan sudah melalui aturan ataupun undang-undang keuangan, bagaimana penyelenggaraan dari sebuah lembaga adat seperti itu. Silakan diatur seperti itu nanti kita lihat pertanggungjawabannya seperti apa. Itu yang menurut saya silakan disesuaikan sesuai aturan di sana.

P10 : Bagaimana dengan program-program untuk kesejahteraan masyarakat? (*Jana kerthi*)

NF : Kalau untuk program-program kesejahteraan masyarakat, mungkin yang lebih saya lihat adalah peningkatan kapasitas atau peningkatan kualitas dari masyarakat utawi *Krama Desa* adat Alapsari, terutama pada anak-anak para *Yowana*. Contohnya saja adalah program Pasraman yang sudah berjalan beberapa tahun ini, dan itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan dari para *Yowana* terkait tradisi seni dan budaya. Serta itu juga dalam hal bantuan untuk mendukung muda-mudi seperti melakukan kreativitas seni, contohnya dalam pembuatan Ogoh-ogoh.

P11 : Apakah ada program pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat? (dimensi Palemahan)

NF : Kalau dalam hal kelestarian lingkungan, mungkin yang saya lihat di tahun 2025, saya lihat kan di Jinengdalem itu ada sumber mata air mungkin sumber mata air itu dijaga baik-baik dengan cara pembuatan apa katering atau bagaimana itu sangat bagus. Mengingat mata air itu kan kita harus jaga sehingga apa yang kita dapatkan itu dapat dengan baik juga kita terima. Terima kasih itu dari support untuk kelestarian lingkungan seperti itu sangat bagus sekali.

P12 : Seberapa puas Bapak/Ibu dengan pengelolaan keuangan desa adat saat ini?

NF : Ya, kalau melihat dari sisi laporan sih sangat puas. Karena kenapa? Laporan itu kan menuntut transparansi. Jadi desa adat di sini *Prajurunya* menurut tiyang sudah terbuka sekali dengan laporannya baik itu secara langsung di *Paruman* maupun melalui media sosial itu sudah sangat bagus menurut saya.

P13 : Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa dana dikelola dengan baik dan sesuai nilai-nilai adat?

NF : Kalau menurut saya dari sisi laporan yang sudah disampaikan tadi, pengelolaan desa adat sudah wajar dalam artian pos-pos anggaran yang sudah ditentukan itu sudah berjalan dan juga pembiayaan-pembiayaan tentang program Desa Adat itu juga sudah bagus berjalan. Mungkin ada beberapa yang masih belum jalan programnya, seperti badan usaha mungkin di tahun ini bisa terealisasi.

P14 : Apakah ada kritik atau saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan?

NF : Kalau dari sisi saran sih, mungkin di desa adat sudah ada istilah pengawas *Sabha Desa* ya. Mungkin koordinasinya aja nanti lebih ditingkatkan komunikasinya, dan kepada *Krama* juga sosialisasinya. Kebetulan kalau *Krama* yang datang itu banyak alangkah baiknya. Mungkin hal itu yang menjadi penekanan agar masyarakat tidak salah tafsir dalam artian karena informasinya yang tidak tahu karena dia tidak datang saat *Paruman* mungkin itu perlu ditingkatkan agar kedatangan *Krama Desa* itu lebih banyak.

P15 : Apa kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa adat?

NF : Kunci keberhasilan dari pengelolaan keuangan itu, yang pertama adalah komitmen untuk membangun desa dulu. Karena dengan komitmen yang tinggi tentu hal-hal yang lain di luar itu tidak akan yang namanya terlintas seperti hal-hal yang menyimpang karena dia sudah memiliki komitmen kuat untuk membangun desa. Yang ke-2 memiliki kejujuran. Yang ke-3 disiplin disiplin itu sangat penting. Harus tegas juga *Prajurunya*, tidak boleh menclamecle. Ada sedikit omongan, itu harus tegas.

P16 : Apa yang bisa dipelajari di desa adat Alapsari oleh desa adat lain?

NF : Oke baik, kalau dari sisi desa adat lain yang saya lihat mungkin di desa adat Alapsari yang sudah membuka informasi di media sosial mungkin seperti yang

saya lihat di media sosial Facebooknya sudah, ataupun sudah dipampang papan informasi terkait dengan pengeluaran desa adat Alapsari. Itu sudah sangat bagus sekali, itu mengikuti desa dinas yang selama ini sudah dijalankan. Kalau program desa adat yang lain bagus dirasakan manfaatnya, kenapa kita tidak meniru disesuaikan saja dengan desa adat di sini.

P17 : Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait pengelolaan keuangan desa adat?

NF : Kalau dari sisi pengelolaan keuangan desa adat ini sudah bagus sih, cuman nanti penyampaian laporannya aja biar masyarakat lebih banyak yang tahu seperti itu. Mungkin dengan cara apa trik-trik atau strategi dari *Prajuru* desa adat sendiri biar uang yang dia kelola itu diketahui oleh masyarakat atau *Krama*.



TRANSKRIP WAWANCARA G (*KERTHA DESA* ADAT ALAPSARI)

Kode Narasumber	G
Nama Narasumber	Ketut Seken
Jabatan / Peran	Anggota <i>Kertha Desa</i> / Pecalang
Tanggal Wawancara	2 Februari 2026
Waktu Wawancara	19.05 – 19.30 WITA
Durasi	25 menit
Lokasi Wawancara	Rumah <i>Kertha Desa</i> , Desa Adat Alapsari
Pewawancara	Peneliti
Bahasa	Indonesia / Bali (Campur kode / <i>Code-switching</i>)

A. Catatan Lapangan Pewawancara (*Field Note*)

Catatan Kontekstual:

Wawancara dilakukan di rumah *Kertha Desa* pada malam hari. Narasumber merupakan anggota *Kertha Desa* yang berfungsi sebagai Lembaga yudikatif dalam pemberian sanksi adat di Desa Adat Alapsari. Narasumber menjawab pertanyaan dari perspektif pengawasan lapangan yang lebih bersifat operasional. Beberapa pertanyaan terkait sanksi adat tidak dapat dijawab secara spesifik karena belum pernah ada kasus pelanggaran. Narasumber berbicara dengan bahasa yang cukup formal dan sistematis.

B. Hasil Wawancara (Verbatim)

Keterangan: P = Pewawancara | N = Narasumber

P1 : Bagaimana peran Bapak dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa adat?

NG : Ya, dalam pengawasan dalam keuangan desa adat ini dimana keuangan desa adat itu sudah sesuai dengan program perencanaan yang direncanakan oleh *Prajuru* Desa dalam hal ini *Kelian* desa beserta *Prajurunya* kami selaku anggota *Kertha Desa* melihat dan mendengar ada undangan untuk pertemuan-pertemuan tentang penggunaan dana. Dalam hal ini beberapa hal yang telah terlaksana, seperti *Danu kerthi* itu sudah dilaksanakan dan kami ada undangan untuk pelaksanaannya. Sedangkan untuk laporan-laporan itu ada prosedur yang dilaksanakan oleh tim dalam hal ini *Prajuru* Desa Adat itu sendiri.

P2 : Apa saja indikator yang diawasi terkait pengelolaan keuangan?

NG : Sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan di desa adat itu sudah ada timing pelaporannya sehingga dalam pelaporan itu kita melihat petunjuk-petunjuk yang telah dilaksanakan. Sehingga masalah anggaran di sana ada selaku bendahara Desa Adat, nah itulah nanti kita lihat dalam pertemuan-pertemuan selama ini saya ikuti.

P3 : Bagaimana mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan?

NG : Mekanisme dan pencegahan tentunya kan secara administrasi, yang mana perencanaan yang direncanakan, terus pelaksanaan, sudah itu pembiayaan. Nah dalam pembiayaan itulah ada penyampaian dalam pertemuan-pertemuan. Jadi dalam pertemuan itu kita diundang untuk mendengarkan, melihat secara administrasi pos-pos yang sudah dikeluarkan.

P4 : Bagaimana nilai-nilai *Sad Kerthi* berperan dalam memperkuat integritas pengelola keuangan?

NG : Bahasa *Sad Kerti* sesuai dengan program Bapak Gubernur kan begitu, ini setiap ada momen sudah dilaksanakan oleh Desa Adat selama ini. Sehingga yang sepemahaman saya ini itu sudah terlaksana dengan baik. Sampai pelaporan telah diterima nah itu jadi sampai saat ini tidak ada masalah, itu berjalan sebagaimana mestinya.

P5 : Apakah ada sanksi adat bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan keuangan?

NG : Kalau istilah pelanggaran sampai saat ini karena belum ada istilah pelanggaran jadi sanksi tidak ada. Yang ada kan kita, apa posnya sudah dikeluarkan, istilahnya ada silpa kan begitu. Nah sehingga dari sana kita melihat keseharian ini sudah dilaksanakan. Jadi sampai saat ini belum pernah ada itu dikenai sanksi karena pelanggaran itu tidak ada, itu menurut pemahaman kami.

P6 : Bagaimana sanksi adat berbeda dengan sanksi administratif?

NG : (Pertanyaan ini tidak dijawab secara spesifik oleh narasumber-narasumber melanjutkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya tentang belum adanya pelanggaran.)

P7 : Apakah pernah ada temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan?

NG : Kalau istilah pelanggaran, sampai saat ini karena belum ada istilah pelanggaran, jadi sanksi tidak ada. Yang ada kan kita, apa posnya sudah dikeluarkan, istilahnya ada silpa kan begitu. Jadi sampai saat ini belum pernah ada itu dikenai sanksi karena pelanggaran itu tidak ada, itu menurut pemahaman kami.

P8 : Bagaimana prosedur penanganan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan?

NG : Nah dalam proses penanganan permasalahan ini tentu akan diadakan pertemuan seperti dalam bahasa nasional ya rapat pertemuan. Di sana dibahas. Terus jika memang nanti aturan-aturan sudah dijelaskan, jika nantinya seandainya ada permasalahan, nah itulah ditingkatkan: ada pertemuan *Prajuru*, ada pertemuan di naikkan madia pertemuan madia nanti pertemuan agung. Nah itulah prosedur-prosedur yang di sana ditentukan oleh *Awig-Awig*. Sehingga tatanannya tetap dari *Prajuru*, ditingkatkan ke *Paruman* madia, nah ditingkatkan lagi ke *Paruman* agung, di sana mengambil keputusan-keputusan.

P9 : Apa tantangan dalam melakukan pengawasan?

NG : Jadi dalam BKK yang diterima oleh desa adat, di mana disampaikan itu kan ada istilah tahapan tahapan amprah jadi tiga kali tahapan kan begitu. Nah oleh itu dengan tahapan-tahapan itu dana cair, program dilaksanakan, terus lanjut pelaksanaannya, lihat perkembangannya, terus ada pelaporan. Nah dalam

pelaporan itulah kita forum rapat untuk membahas. Nah sehingga akhir tahun sampai pertanggungjawaban ini sudah tetap dilaksanakan. Tantangannya ya salah satunya sudah disesuaikan sekarang sumber daya manusia kan gitu itu yang perlu ditekankan sekarang bagaimana pelaporan itu sesuai dengan tepat waktu, proseduralnya, arsip-arsipnya.

P10 : Apa kunci keberhasilan pengelolaan keuangan desa adat?

NG : Kunci suatu keberhasilan jadi program itu sudah terlaksana, sekarang kan tinggal meningkatkan kualitasnya kan begitu. Jadi kualitas-kualitas itu apa makna-makna bagi kehidupan itu sendiri, ya alam kan begitu beserta ada yang di dalamnya. Nah itu sehingga pemeliharaan dalam konteks hubungan manusia dengan alam dan lingkungan itu bisa serasi, sejalan sehingga timbulah kesejahteraan bagi semua alam beserta isinya. Demikian menurut pandangan kami.

P11 : Apa yang bisa dipelajari di desa adat Alapsari oleh desa adat lain?

NG : Rasanya kalau itu masing-masing desa adat kan istilahnya sumber alamnya itu berbeda-beda kan begitu ya. Kebetulan ini dalam artian desa adat Alapsari ini kan sumber alamnya ini kecil desanya kecil karena wilayahnya juga kecil dan desa adat ini kan baru. Yang menjadi dasar: satu parahyangan tempat suci, kedua *Kramanya*. Sedangkan *pelabanya* hampir tidak ada dan sumber alam yang ada di lingkungan desa adat itu sendiri adalah sumber daya alam yang menjadi hak milik. Nah sekarang ada istilahnya tanah pedesaan itu sudah ditempatkan oleh masing-masing keluarga secara turun temurun.

P12 : Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan terkait pengelolaan keuangan desa adat?

NG : Nah tentu dalam hal pengelolaan karena berbicara keuangan ini sangat riskan. Jadi *Prajuru-Prajuru* ini perlu mendapat pelatihan-pelatihan sehingga dia lebih fokus bagaimana mengelola dan membuat perencanaan yang lebih mendekati dan pas apa yang menjadi kebutuhan untuk menyambung kehidupan realita kehidupan adat, desa adat itu. Jadi seperti pemeliharaan benda-benda suci atau kebudayaan tari-tarian itu biar tari sakral, gamelan, istilahnya itu dipelihara dengan bijak. Nah sehingga ini akan menjadi

komoditas yang perlu dipertahankan karena desa adat itu kan unik satu dengan yang lain berbeda walaupun dalam kerangka agama Hindu.

III. Lampiran Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Observasi *Paruman* LPJ dan Perencanaan Desa Adat Alapsari Diakses pada 11 Pebruari 2026

DESA ADAT ALAPSARI KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng			INFORMASI LAPORAN PENGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025 DESA ADAT ALAPSARI		LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA ADAT ALAPSARI TAHUN 2025	
I. PENDAPATAN			Anggaran		Realisasi	
1. APBD Semesta Berencana			Rp 300.000.000,00		Rp 300.000.000,00	
II. BELANJA			Rp 100.000.000,00		Rp 99.866.800,00	
1. Rutin			Rp 110.600.000,00		Rp 110.182.000,00	
2. Program Baga Perancangan			Rp 38.000.000,00		Rp 48.665.000,00	
3. Program Baga Peningkatan			Rp 31.400.000,00		Rp 31.276.000,00	
4. Program Baga Pemeliharaan			Nominal Total		Rp 300.000.000,00	
SILPA			Rp 10.010.200,00		Rp 289.989.800,00	

Dokumentasi Laporan pertanggungjawaban yang dibagikan saat *Paruman* Agung Diakses pada 11 Pebruari 2026 pada saat



Dokumentasi Baliho LPJ dipertigaan Desa Adat Alapsari
Diakses pada 11 Pebruari 2026



Dokumentasi Baliho LPJ didepan Kantor Desa Adat Alapsari
Diakses pada 11 Pebruari 2026

IV. Dokumentasi Laporan dalam bentuk Dokumen

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
DANA HIBAH DESA ADAT ALAPSARI
TAHUN ANGGARAN 2025



Desa Adat	: ALAPSARI
Alamat Sekretariat	: BANJAR DINAS GAMBANG
Desa Dinas/Kelurahan	: JINENGDALEM
Kecamatan	: BULELENG
Kabupaten/Kota	: BULELENG
Nama Kelian Desa	: I GEDE DEDI HERAWAN
No. HP Kelian Desa	: 081805408730

7/1/2025.
Ny. Gede Dedi Herawan
asif



ᮊᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ

DESA ADAT ALAPSARI

ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ

KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ

Sekretariat : Banjar Dinas Gambang, Desa Jinengdalem, Kode Pos: 81119

Alapsari, 31 Desember 2025

Nomor : 097/DAAS/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Laporan
Pertanggungjawaban Belanja
Dana Hibah Desa Adat
Tahun Anggaran 2025

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Bali
c.q. Kepala Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat Provinsi Bali
di -
Bali

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah Desa Adat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai pertanggungjawaban terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alapsari, 31 Desember 2025

Kelian Desa Adat Alapsari



(I Gede Dedi Herawan)

Tembusan :

1. Arsip



ආගමන සභාව
DESA ADAT ALAPSARI
කිසිසෙයකි භූමිකා සංස්කෘතිය
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
ආගමන සභාව : භූමිකා සංස්කෘතිය, ආගමන සභාව
Sekretariat : Banjar Dinas Gambang, Desa Jinengdalem, Kode Pos: 81119

**LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN BELANJA DANA HIBAH DESA ADAT
ANGGARAN 2025**

DESA ADAT ALAPSARI

Nomor : 099/DAAS/XII/2025

No	Jumlah Hibah yang Diterima (Rp.)	No	Uraian Penggunaan	Jumlah Hibah yang dipergunakan (Rp.)	Keterangan (Rp.)
1	2	3	4	5	6=(2-5)
1	30.000.000,00	1	Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain	30.000.000,00	0,00
2	52.980.000,00	2	Insentif Prajuru Desa Adat	52.980.000,00	0,00
3	1.520.000,00	3	Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat	1.509.000,00	11.000,00
4	8.000.000,00	4	Biaya Perjalanan Prajuru Desa Adat dan lembaga-lembaga Adat	7.950.000,00	50.000,00
5	604.800,00	5	Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan	604.800,00	0,00
6	6.895.200,00		Belanja penunjang operasional Pemerintahan Desa Adat lainnya	6.823.000,00	72.200,00
7	10.000.000,00		(1. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan	9.700.000,00	300.000,00
8	79.600.000,00		Kegiatan Pengadaan Upakara (banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Desa Adat di Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga	79.575.000,00	25.000,00
9	21.000.000,00		Kegiatan Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga	20.907.000,00	93.000,00
10	10.000.000,00		(2. PROGRAM PRIORITAS) Penyelenggaraan Pasraman	9.965.000,00	35.000,00

11	3.000.000,00	(3. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan peningkatan kapasitas Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kertha Desa Adat	0,00	3.000.000,00
12	2.000.000,00	(4. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)	0,00	2.000.000,00
13	3.000.000,00	(5. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebali, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat	2.912.000,00	88.000,00
14	10.000.000,00	(6. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebunan yang ada di Desa Adat	7.210.000,00	2.710.000,00
15	5.000.000,00	(7. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan pelatihan pasantian/membentuk sekaa santi	4.965.000,00	35.000,00
16	7.000.000,00	(8. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali	7.000.000,00	0,00
17	3.000.000,00	(9. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dan Peningkatan kapasitas SDM Forum SIPANDUBERADAT serta BANKAMDA	1.660.000,00	1.340.000,00
18	15.000.000,00	Kegiatan pengadaan sarana prasarana lembaga adat yang terdiri atas Paiketan Pamangku, Serati, Wredha, Pacalang, Yowana, Krama Istri, pasraman, sekaa dan lembaga adat lainnya	14.953.000,00	47.000,00
19	5.000.000,00	(10. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Fasilitasi Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut	4.923.000,00	77.000,00

20	14.400.000,00	(11. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan pengelolaan sampah di Wewidangan Desa Adat digunakan untuk membiayai kegiatan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber	14.400.000,00	0,00
21	5.000.000,00	Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan Wantilan/Balai Banjar Desa Adat	4.983.000,00	17.000,00
22	2.000.000,00	Kegiatan penataan/pemeliharaan Wewidangan Desa Adat	1.983.000,00	17.000,00
23	5.000.000,00	Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan Setra Desa Adat	4.987.000,00	13.000,00
300.000.000,00		NOMINAL TOTAL	289.989.800,00	10.010.200,00

Alapsari, 31 Desember 2025

Kelian Desa Adat Alapsari



(I Gede Dedi Herawan)



(Ketut Sulaba)

**LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN KEUANGAN DESA ADAT
YANG BERSUMBER DARI APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA ADAT ALAPSARI**

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KETERANGAN
1	Alapsari	Belanja Rutin		100.000.000	99.866.800	133.200	SILPA
1.1		Insentif Prajuru Adat		82.980.000	82.980.000	0	-
1.1.1		Insentif Bandesa Adat / Sebutan Lain		30.000.000	30.000.000	0	-
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan januari sampai bulan Maret 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		7.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan April 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan Mei dan Juni 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		5.000.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan Juli 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan Agustus 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan September 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan Oktober 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan Nopember 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Kelian Desa Adat , Desa Adat Alapsari bulan Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
1.1.2		Insentif Prajuru Desa Adat		52.980.000	52.980.000	0	-
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan Januari sampai Maret Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		13.245.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan April Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.415.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan Mei dan Juni Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		8.830.000		

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan Juli Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.415.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan Agustus Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.415.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan September Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.415.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.415.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan Nopember Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.415.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Insentif Prajuru Desa Adat Alapsari bulan Desember Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.415.000		
1.1.3		Insentif Staf Kesekretariatan Desa Adat		0	0	0	-
1.2		Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Desa Adat		17.020.000	16.886.800	133.200	SILPA
1.2.1		Penyediaan makan dan minum rapat/paruman/pasangkepang serta makan minum bagi lembaga-lembaga Desa Adat saat melaksanakan tugas		0	0	0	-
1.2.2		Alat Tulis Kantor (ATK), materai, fotocopy, dan pengiriman surat		1.520.000	1.509.000	11.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Matrai tempel Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		601.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		408.000		
1.2.3		Biaya Operasional penyelesaian perkara adat/mediasi berdasarkan hukum adat		0	0	0	-
1.2.4		Biaya Operasional Nguwah – uwuhin (penyempurnaan) Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat		0	0	0	-
1.2.5		Biaya operasional jaringan internet		0	0	0	-
1.2.6		Biaya Perjalanan Prajuru Desa Adat dan lembaga-lembaga Adat		8.000.000	7.950.000	50.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke Lapangan Niti Mandala Renon dalam rangka Gelar Agung Pecalang (rincian terlampir)		2.400.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke DPMA Provinsi Bali dalam rangka Penytoran Amprah Tahap I (rincian terlampir)		200.000		

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke Panggung terbuka Ardha Candra dalam rangka Koordinasi Gerakan Bali Bersih Sampah (rincian terlampir)		200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke Kantor Camat Buleleng dalam rangka Technical meeting lomba Dharma Gita Dewasa antar Desa Adat se- Kecamatan Buleleng tahun 2025 (rincian terlampir)		150.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi Truna ke Puspem, Balai Budaya Giri Nata Mandala, Badung (rincian terlampir)		400.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke Lapangan Niti Mandala Renon dalam rangka Gelar Agung Pecalang PADGATAKALA tgl 17 mei 2025(rincian terlampir)		3.400.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke DPMA Provinsi Bali dalam rangka Penyetoran Amprah Tahap III (rincian terlampir)		200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke DPMA Provinsi Bali dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Tahun 2025 (rincian terlampir)		800.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang Saku dan Transportasi ke Pura Samuan Tiga dalam Pesamuhan Agung ke V Tahun 2025 (rincian terlampir)		200.000		
1.2.7		Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan		604.800	604.800	0	-
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Desa Adat (Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 1 tahun), Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		604.800		
1.2.8		Belanja penunjang operasional Pemerintahan Desa Adat lainnya.		6.895.200	6.823.000	72.200	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Ban sepeda motor Honda Supra DK 3344 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Kipas duduk, Korden dan Dispenser untuk di sekretariat Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		3.284.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya Servis Printer Epson Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		100.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya samsat sepeda motor Vario DK 2993 UBS Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.233.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Material tempel Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		500.000		

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		506.000		
2		Belanja Program		200.000.000	190.123.000	9.877.000	SILPA
2.1		Program Baga Parahyangan		110.600.000	110.182.000	418.000	SILPA
2.1.1		(1. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Fasilitas Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan		10.000.000	9.700.000	300.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Camera CCTV untuk di Pura Dalam dan Pura Bukit Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		9.700.000		
2.1.2		Kegiatan Pengadaan Upakara (banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Desa Adat di Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga		79.600.000	79.575.000	25.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa 6 Ekor celeng dalam Kegiatan Nyepi Ageng Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		36.480.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja keperluan upakara Kegiatan Persembahyangan/Muspa bersama setiap Purnama dan Tilem bulan Januari s/d Juli 2025 pada Pura Kahyangan Desa/Kahyangan Tiga Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		5.250.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja keperluan upakara Kegiatan Persembahyangan/Muspa bersama setiap Purnama dan Tilem bulan Agustus 2025 pada Pura Kahyangan Desa/Kahyangan Tiga Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		750.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja keperluan upakara Kegiatan Persembahyangan/Muspa bersama setiap Purnama dan Tilem bulan September 2025 pada Pura Kahyangan Desa/Kahyangan Tiga Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		750.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja keperluan upakara Kegiatan Persembahyangan/Muspa bersama setiap Purnama dan Tilem bulan Oktober 2025 pada Pura Kahyangan Desa/Kahyangan Tiga Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		750.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa 7 Ekor celeng seberat 791 Kg dalam Kegiatan Piodalan Pura Kahyangan Desa Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		35.595.000		
2.1.3		Kegiatan Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan pada Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga		21.000.000	20.907.000	93.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Bahan Pembangunan Atap dalam Kegiatan Penataan Parahyangan Pura Dalam Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		3.637.000		

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya Olah-Olahan Panitia Pembangunan pada pelaksanaan kegiatan Penataan perahyangan Pura Dalam Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.700.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Akrilik dalam Kegiatan Penataan Perahyangan Pura Dalam Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja upakara Kegiatan Penataan Pura Dalam, Setra dan Yeh Anakan (Banten Ngulapin)		3.300.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Arnet jaring dalam Kegiatan Penataan Perahyangan Pura Dalam Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan Perahyangan Pura Dalam dan Setra (Upah tukang dan pengayuh Pemasangan Paving) Tahun Anggaran 2025 (Rincian terlampir)		8.400.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Alat kelengkapan dan Jasa dalam Kegiatan Penataan Pura Kahyangan Desa Adat Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.170.000		
2.1.4		Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga		0	0	0	-
2.1.5		Pembangunan Desa Adat Baga Parahyangan Lainnya		0	0	0	-
2.2		Program Baga Pawongan		58.000.000	48.665.000	9.335.000	SILPA
2.2.1		(2. PROGRAM PRIORITAS) Penyelenggaraan Pasraman		10.000.000	9.965.000	35.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari pada pelaksanaan kegiatan Pasraman Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		9.965.000		
2.2.2		(3. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan peningkatan kapasitas Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, dan Kertha Desa Adat		3.000.000	0	3.000.000	SILPA
2.2.3		(4. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan peningkatan kapasitas Pengelola Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)		2.000.000	0	2.000.000	SILPA
2.2.4		(5. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan menggali dan membina seni wali, seni bebal, dan seni tradisi yang ada di Desa Adat		3.000.000	2.912.000	88.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Alat berupa perlengkapan penari rejang Dewa Desa Adat Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.912.000		
2.2.5		(6. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebanan yang ada di Desa Adat		10.000.000	7.210.000	2.790.000	SILPA

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebulan yang ada di Desa Adat berupa honor pelatih sekaa gong Pakis Bulan September Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		400.000		
			Belanja kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebulan yang ada di Desa Adat berupa honor pelatih sekaa gong Anak-anak dan Remaja Bulan Juli Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		450.000		
			Belanja kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebulan yang ada di Desa Adat berupa honor pelatih sekaa gong Anak-anak dan Remaja Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		450.000		
			Belanja kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebulan yang ada di Desa Adat berupa honor pelatih sekaa gong Anak-anak dan Remaja Bulan September Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		450.000		
			Belanja kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebulan yang ada di Desa Adat berupa honor pelatih sekaa gong Pakis Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		400.000		
			Belanja kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebulan yang ada di Desa Adat berupa honor pelatih sekaa gong Anak-anak dan Remaja Bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		450.000		
			Belanja kegiatan pembinaan/pelatihan seni sekaa sebulan yang ada di Desa Adat berupa honor pelatih sekaa gong Anak-anak dan Remaja Bulan Nopember Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		450.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Saput untuk Skee gong Anak-anak Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.170.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Pakaian Skee gong anak-anak Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.990.000		
22.6		(7. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan pelatihan pasantian/membentuk sekaa santi		5.000.000	4.965.000	35.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Pakaian peserta Lomba Dharma Gita Dewasa se-Kecamatan Buleleng Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.000.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya Olah-Olahan Tim Lomba Dharma Gita Dewasa antar Desa Adat se-Kecamatan Buleleng Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa rias peserta lomba pada pelaksanaan kegiatan Lomba Dharma Gita antar Desa Adat se-Kecamatan Buleleng Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		400.000		

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Sewa Transportasi Akomodasi pada pelaksanaan kegiatan Lomba Dharma Gita antar Desa Adat se-Kecamatan Buleleng Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		250.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja Snack Latihan dan Nasi Kotak Hari H dalam Kegiatan Lomba Dharma Gita antar Desa Adat se-Kecamatan Buleleng Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		815.000		
2.2.7		(8. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Bulan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali		7.000.000	7.000.000	0	-
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Makan dan Minum pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yowana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya Olih-Olihan Panureksa pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yoana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		600.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Banten Piuning pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yowana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.150.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Juara pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yoana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.100.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Sewa Dekorasi pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yowana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		800.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Sewa Mobil Akomodasi pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yowana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		300.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Alat Tulis pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yowana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		250.000		

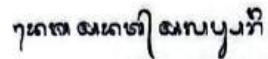
NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Plata pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yowana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya Olih-Olihan Panitia pada pelaksanaan kegiatan Lomba Karaoke lagu Bali tingkat Pakis dan Yoana Istri dalam rangka perayaan Bulan Bahasa Bali tanggal 26 Februari 2025 Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.100.000		
2.2.8		(9. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Forum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dan Peningkatan kapasitas SDM Forum SIPANDUBERADAT serta BANKAMDA		3.000.000	1.660.000	1.340.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Uang saku Pecalang dan lembaga Bakamda dalam penjagaan menjelang Tahun Baru Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.450.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja Snack dan nasi dalam Kegiatan Penjagaan malam menjelang Tahun baru Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		210.000		
2.2.9		Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga adat yang terdiri atas Paiketan Pamangku, Serati, Wredha, Pacalang, Yowana, Krama Istri, pasraman, sekaa dan lembaga adat lainnya		0	0	0	-
2.2.10		Kegiatan pengadaan sarana prasarana lembaga adat yang terdiri atas Paiketan Pamangku, Serati, Wredha, Pacalang, Yowana, Krama Istri, pasraman, sekaa dan lembaga adat lainnya		15.000.000	14.953.000	47.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Pakaian Pecalang Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.258.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Keris Pecalang Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.000.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa pembelian Buku Peshantian Lanang Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		710.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Udeng dan Saput untuk Krama Wredha Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		3.485.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Pakaian untuk Paiketan Pamangku Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		3.300.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Kamben dan Selendang untuk Pakis Desa Adat Alapsari Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		4.200.000		

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
2.2.11		Pembangunan Desa Adat Baga Pawongan Lainnya		0	0	0	-
2.3		Program Baga Palemahan		31.400.000	31.276.000	124.000	SILPA
2.3.1		(10. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan Fasilitas Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut		5.000.000	4.923.000	77.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari Berupa Kegiatan Penataan Sumber Mata Air Yeh Anakan (Upah tukang dan pengayah) Tahun Anggaran 2025 (Rincian terlampir)		750.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Bahan Pembangunan dalam Kegiatan Penataan Sumber Mata Air Yeh Anakan Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		183.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja keperluan upakara Kegiatan Penataan Sumber Mata Air Yeh Anakan Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.890.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Kotak sesari dan tempat Gong Gejir dalam Kegiatan Penataan Sumber Mata Air Yeh Anakan Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.100.000		
2.3.2		(11. PROGRAM PRIORITAS) Kegiatan pengelolaan sampah di Wewidangan Desa Adat digunakan untuk membiayai kegiatan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber		14.400.000	14.400.000	0	-
			Biaya pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat Biaya olih2an pengelolaan kebersihan di wewidangan Pura Khayangan Tiga Desa Adat Alapsari bulan Januari sampai Maret Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		3.200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat (Biaya olih-olihan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah di wewidangan Pura Khayangan Tiga Desa Adat Alapsari) bulan April Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa (Biaya olih-olihan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah di wewidangan Pura Khayangan Tiga Desa Adat Alapsari) bulan Mei dan Juni Tahun Anggaran 2025		2.400.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat (Biaya olih-olihan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah di wewidangan Pura Khayangan Tiga Desa Adat Alapsari) bulan Juli Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.200.000		

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/ LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat (Biaya olih-olihan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah di wewidangan Pura Khayangan Tiga Desa Adat Alapsari) bulan Agustus Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat bulan September Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat (Biaya olih-olihan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah di wewidangan Pura Khayangan Tiga Desa Adat Alapsari) bulan Oktober Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Biaya pengelolaan sampah di wewidangan Desa Adat (Biaya olih-olihan pengelolaan kebersihan) bulan Nopember Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa (Biaya olih-olihan pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah di wewidangan Pura Khayangan Tiga Desa Adat Alapsari) bulan Desember Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.200.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari Berupa Kegiatan Pembersihan/pemeliharaan timbunan sampah yang ada di Areal Setra (Upah tenaga) Tahun Anggaran 2025 (Rincian terlampir)		400.000		
2.3.3		Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan Wantilan/Balai Banjar Desa Adat		5.000.000	4.983.000	17.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari Berupa Kegiatan Servis sekretariat Desa Adat (Upah tukang dan pengayah) Tahun Anggaran 2025 (Rincian terlampir)		2.100.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Gipsun dan kelengkapannya dalam Kegiatan Penataan Sekretariat Adat Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		63.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Bahan Pembangunan dalam Kegiatan Servis Sekretariat Adat Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		720.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Talang Air di Powaregan Pura Bukit dalam Kegiatan Penataan Wewidangan PuraBukit Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.800.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari Berupa Kegiatan Pembersihan/pemeliharaan Areal Sekretariat Desa Adat (Upah tenaga) Tahun Anggaran 2025 (Rincian terlampir)		300.000		
2.3.4		Kegiatan penataan/pemeliharaan Wewidangan Desa Adat		2.000.000	1.983.000	17.000	SILPA

NO	DESA ADAT	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PENGGUNAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	NOMINAL REALISASI (Rp)	KURANG/LEBIH (Rp)	KETERANGAN
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Makmin Acara Pemangkasan Pohon beringin yang ada di Pura Bukit Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		1.243.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja keperluan upakara Kegiatan Penataan Wewidangan Desa Adat Pada Pemangkasan Pohon Beringin yang ada di Pura Bukit Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		740.000		
2.3.5		Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan Setra Desa Adat		5.000.000	4.987.000	13.000	SILPA
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Belanja keperluan upakara Kegiatan Penataan Setra dan Yeh Anakan (Banten Piuning lan tedun Krama) Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		800.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Alat kelistrikan dan Jasa dalam Kegiatan Penataan Setra Desa Adat Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		385.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari Berupa Kegiatan Pembersihan/pemeliharaan Areal Setra (Upah tenaga) Tahun Anggaran 2025 (Rincian terlampir)		500.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari berupa Alat kelistrikan dan Jasa dalam Kegiatan Penataan Setra Desa Adat dan atau Pura dalam Desa Adat Tahun Anggaran 2025 (rincian terlampir)		2.802.000		
			Belanja Desa Adat Alapsari Berupa Kegiatan Pembersihan/pemeliharaan Areal Wewidangan Setra Desa Adat (Upah tenaga) Tahun Anggaran 2025 (Rincian terlampir)		500.000		
2.3.6		Kegiatan yang mendorong pembentukan dan pengembangan unit usaha sektor riil dalam bentuk Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)		0	0	0	-
2.3.7		Kegiatan pembentukan dan pengembangan Labda Pacingkremen Desa (LPD) Adat/ Sebutan Lain, dalam bentuk fasilitasi, pengadaan sarana prasarana penunjang. Kegiatan pembentukan dan pengembangan Labda Pacingkremen Desa (LPD) Adat/ Sebutan Lain		0	0	0	-
2.3.8		Kegiatan Pembangunan Desa Adat Baga Palembang Lainnya.		0	0	0	-
3		Pengeluaran Pemblayaan Desa Adat		0	0	0	-
Nominal Total				300.000.000	289.989.800	10.010.200	SILPA

Dokumen ini dicetak pada Tanggal 06 Januari 2026, pukul 19:13:55 melalui <https://www.sikuat.baliprov.go.id>



ឆ័យសមាគម ក្បាច់រូប គេរូបកម្មសមាគម ក្បាច់រូប

[illegible]

 Dipindai dengan CamScanner

Poto Kegiatan Pembangunan/penataan/renovasi/pemeliharaan pada
Pura Kahyangan Desa dan/atau Kahyangan Tiga
Pemavingan Jaba Tengah Pura dalam

0%



50%



OPPO A54 • @sulab.id
2025/03/05 14:05

100%

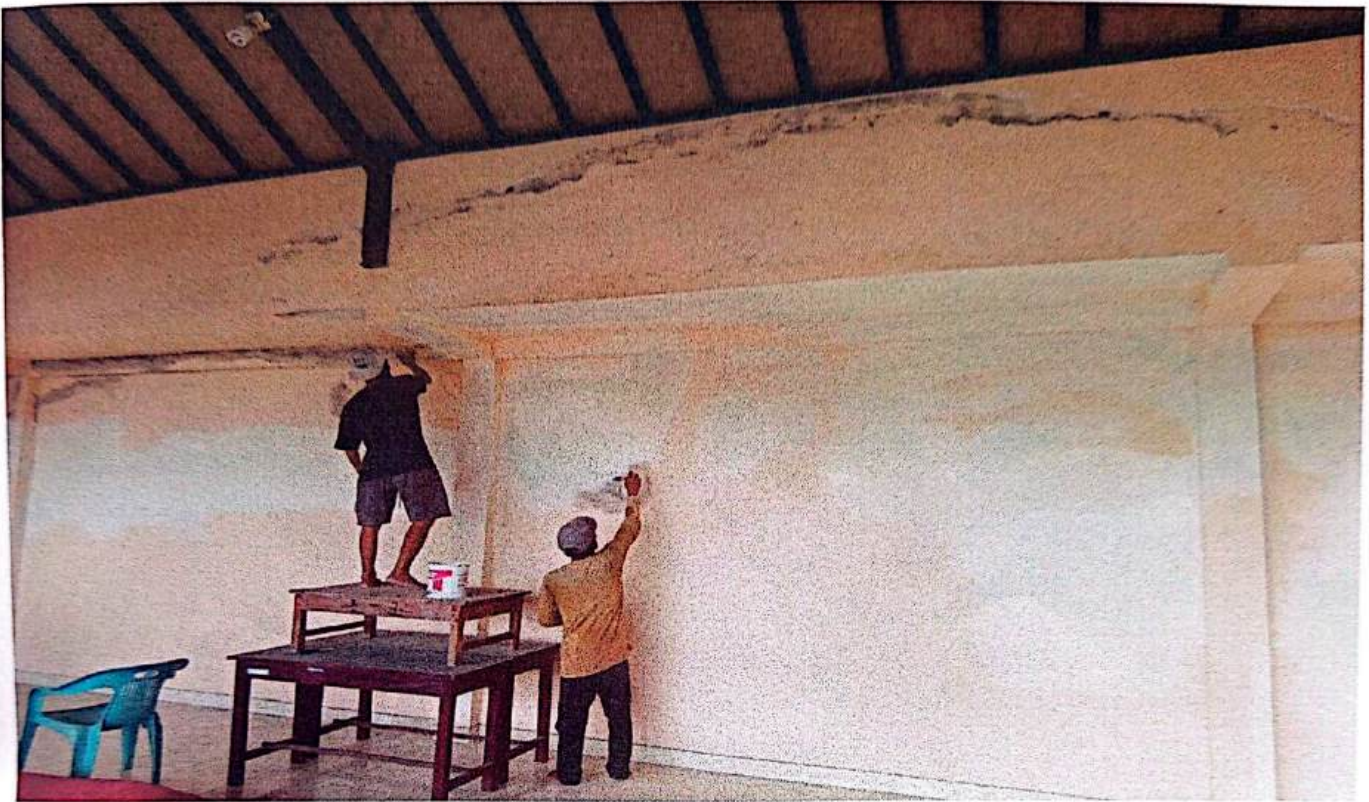


OPPO A54 · ©sulab.id
025/03/17 15:03

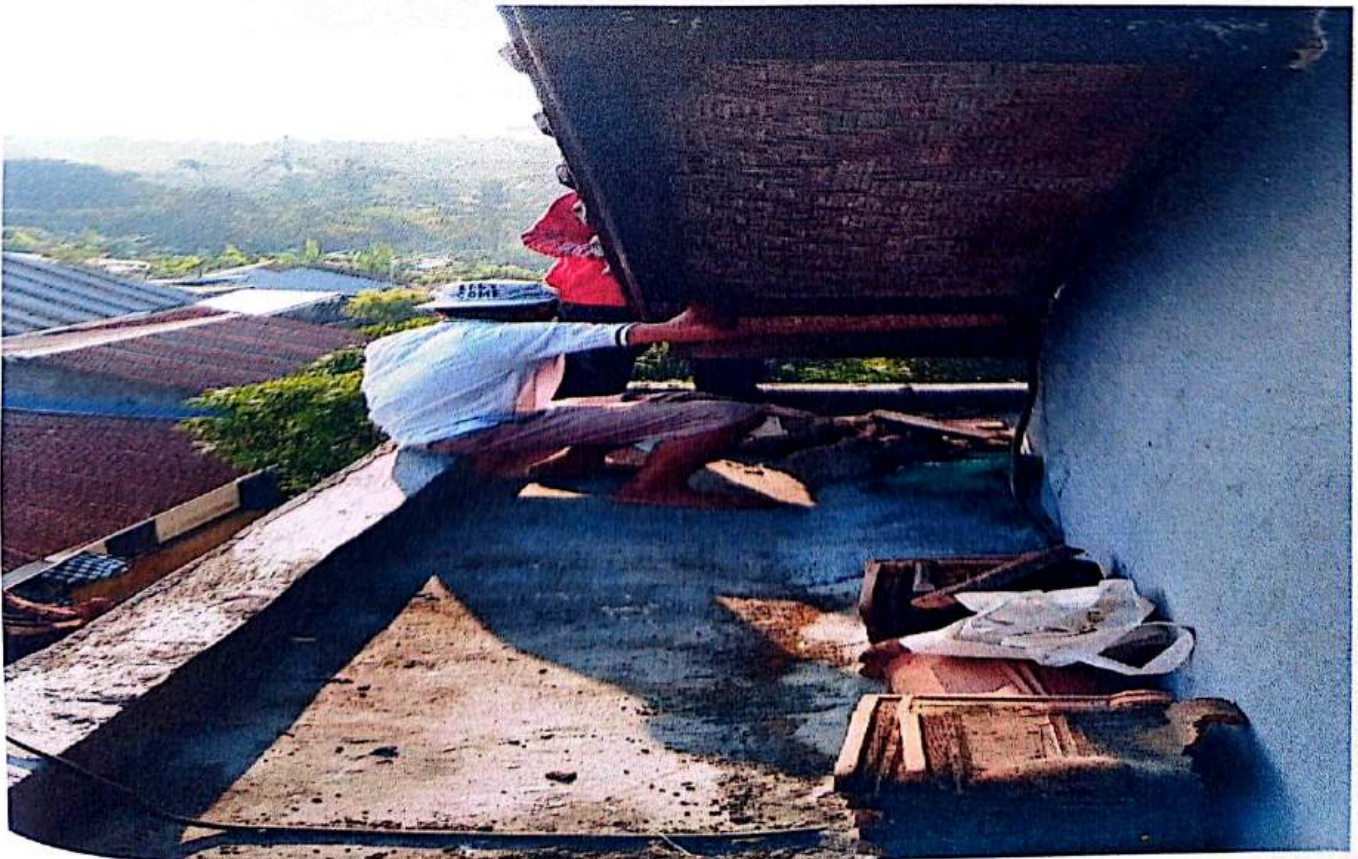
Poto Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan
Wantilan/Balai Banjar Desa Adat

Servis Sekretariat

0%



50%



100%



Poto Kegiatan pembangunan/ penataan/ renovasi/ pemeliharaan Setra
Desa Adat

0%



50%



100%





ᮊᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ

DESA ADAT ALAPSARI

ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ

KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

ᮊᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ ᮘᮘᮞᮒ

Sekretariat : Banjar Dinas Gambang, Desa Jinengdalem, Kode Pos: 81119

BERITA ACARA PARUMAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) PRAJURU DESA ADAT ALAPSARI

Nomor : 009/DAAS/II/2026

Pada hari ini **RABU**, tanggal 11 Pebruari 2026, bertempat di **Pura Bukit Desa Adat Alapsari**, telah dilaksanakan **Paruman Agung** dengan agenda **Penyampaian dan Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Prajuru Desa Adat Tahun 2025**.

I. DASAR PELAKSANAAN

Paruman ini dilaksanakan berdasarkan:

1. Awig-Awig Desa Adat Alapsari
2. Pararem Desa Adat Alapsari
3. Kesepakatan Prajuru dan Krama Desa Adat

II. PESERTA PARUMAN

Paruman dihadiri oleh:

- Kelian Desa Adat
- Parahulu Desa
- Prajuru Desa
- Kelian Banjar Adat Bukit lan Gambang
- Sabha Desa
- Kerta Desa
- Krama Desa Adat (daftar hadir terlampir)

III. JALANNYA PARUMAN

1. Paruman dibuka oleh **Sekretaris Desa Adat Alapsari**
2. Sambutan oleh **Kelian Desa Adat Alapsari** terkait pemaparan tujuan paruman
3. Penyampaian **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)** oleh Patengen Desa Adat yang meliputi:
 - Laporan kegiatan Desa Adat
 - Laporan keuangan
 - Evaluasi pelaksanaan program
4. Sesi tanggapan, saran, dan masukan dari krama desa
5. Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan yang disampaikan

IV. KEPUTUSAN PARUMAN

Setelah dilakukan pembahasan, paruman menyepakati bahwa:

1. Laporan Pertanggungjawaban dari Patengen 1 (Putu Samayasa) induk Piodalan dan Keuangan Desa Adat tahun 2025 diterima / disetujui.
2. Laporan Pertanggungjawaban dari Patengen 2 (Ketut Sulaba) induk Penggunaan Keuangan Desa Adat yang bersumber dari APBD Semester Brencan Prinsi Bali tahun 2025 diterima / disetujui.
3. Catatan dan Saran dari Krama Desa akan menjadi bahan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
4. Rencanan program kedepan induk kebiakatan dijabarkan, penileman
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. keluarkan No. 10.00

V. PENUTUP

Demikian Berita Acara Paruman Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alapsari
Tanggal : 11 Pebruari 2026

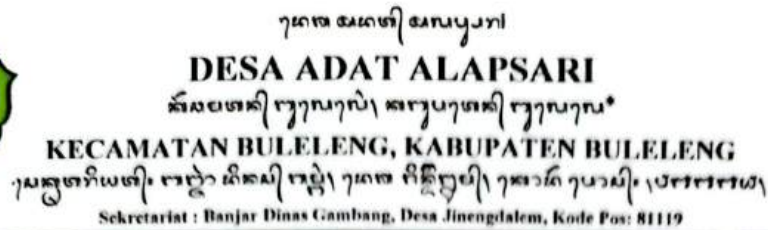


Sekretaris
(Ketut Nasa Purbarasa)

Patengen I & II
(Putu Samayasa, Ketut Sulaba)

Mengetahui,
Prajuru/Krama Desa Adat Alapsari

1. Ketut Wisma
2. WY YASTIKA
3. Kd. Supri Budiadnyana
4. Kadek Suparta
5. MAS. SURYAWI



Hari/Tanggal : Buda, 11 Pebruari 2026
Tempat : Jaba Tengah Pura Bukit
Waktu : 12.00 Wita
Acara : Paruman LPJ Dana Desa Adat Tahun Buku 2025

 Dipindai dengan CamScanner



ආගමන සහතික පත්‍රයකි

DESA ADAT ALAPSARI

කිසිවෙකු විසින්ම නොවන බවට තහවුරු කිරීම

KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

ආගමන සහතික පත්‍රයකි, ආගමන සහතික පත්‍රයකි, ආගමන සහතික පත්‍රයකි

Sekretariat : Banjar Dinas Gambang, Desa Jinengdalem, Kode Pos: 81119

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
20	KT Budilasa	Krama	
21	Ngh Widiara	Krama	
22	Ma. Atka	- " -	
23	KD Susila	- " -	
24	Wyn. Artika	Krama	
25	Kt. gina	- " -	
26	Kt. Darpe	- " -	
27	Kt. Buntana	- " -	
28	LT. MAYA	- " -	
29	Kadex Wibawa	Krama	
30	Kt Sanggra	"	
31	KD. DARMA	"	
32	GD. SAWATIKA	"	
40	Kt Beraka	"	
41	Kt Werka	"	
42	Kt. Sumara	"	
43	Kt. Sudarnata	"	
44	Ngh. Soeta	"	
45	Nym Sumara	"	
46	Ngh. Yartina		
47	Kt. Renada		
48	Kt. Ariant		





The board is titled "DESA ADAT ALAPSARI" and "KABUPATEN BULELENG". It contains a financial report for the year 2019, a list of community members, and several photographs of community events and activities.

DESA ADAT ALAPSARI
KABUPATEN BULELENG

DAFTAR PENGANTAR

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

DAFTAR PENGANTAR

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...